



**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2016**

Buku I



**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

WALIKOTA JAMBI

TAHUN 2016

Buku II



WALIKOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2016 ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. LKPJ Tahun 2016 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil dan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, sesungguhnya merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif, tentunya kami sangat menyadari bahwa, masih terdapat kekurangan yang harus kita benahi bersama, agar penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Jambi kedepan akan menjadi lebih baik.

Semoga apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho Allah *Subhanahuwataala*.

Terima kasih.

WALIKOTA JAMBI

H. SYARIF FASHA, ME

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Gambaran Umum Daerah	2
1.2.1. Kondisi Geografis Daerah	2
1.2.2. Gambaran Umum Demografi	3
1.2.3. Kondisi Ekonomi	5
1.3. Potensi Unggulan Daerah	8
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	
2.1. Visi dan Misi	10
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	11
2.2.1. Strategi Pembangunan Daerah	11
2.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	12
2.3. Prioritas Pembangunan Daerah	12
2.3.1. Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur	13
2.3.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	14
2.3.3. Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi	14
2.3.4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	15
2.3.5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	16
2.3.6. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	16
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	19
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	20
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan	20
3.1.3. Permasalahan dan Solusi	26
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	27
3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah	27
3.2.2. Target dan Realisasi	28
3.2.3. Permasalahan dan Solusi	29
3.2.4. Rencana dan Realisasi Pembiayaan	30
 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
4.1. Urusan Wajib	31
4.1.1. Urusan Pendidikan	31
4.1.2. Urusan Kesehatan	36

4.1.3.	Urusan Pekerjaan Umum	38
4.1.4.	Urusan Perumahan	39
4.1.5.	Urusan Penataan Ruang	41
4.1.6.	Urusan Perencanaan Pembangunan.....	42
4.1.7.	Urusan Perhubungan	43
4.1.8.	Urusan Lingkungan Hidup	44
4.1.9.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	46
4.1.10.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48
4.1.11.	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	50
4.1.12.	Urusan Sosial	50
4.1.13.	Urusan Ketenagakerjaan	51
4.1.14.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	52
4.1.15.	Urusan Penanaman Modal	53
4.1.16.	Urusan Kebudayaan.....	54
4.1.17.	Urusan Pemuda dan Olah Raga.....	55
4.1.18.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	56
4.1.19.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	57
4.1.20.	Urusan Ketahanan Pangan	61
4.1.21.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	62
4.1.22.	Urusan Kearsipan.....	63
4.1.23.	Urusan Informasi dan Komunikasi	63
4.1.24.	Urusan Perpustakaan.....	64
4.2.	Urusan Pilihan yang Dilaksanakan	65
4.2.1.	Urusan Pertanian.....	65
4.2.2.	Urusan Kehutanan.....	67
4.2.3.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	68
4.2.4.	Urusan Pariwisata	69
4.2.5.	Urusan Kelautan dan Perikanan	70
4.2.6.	Urusan Perdagangan	71
4.2.7.	Urusan Perindustrian	72
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
6.1.	Kerjasama antar Daerah	77
6.1.1.	Kebijakan dan Kegiatan.....	77
6.1.2.	Kegiatan Pertemuan APEKSI	77
6.1.3.	Kegiatan Pertemuan AKKOPSI	78
6.2.	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	79
6.3.	Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	84
6.4.	Pembinaan Batas Wilayah	85
6.5.	Penanganan Bencana.....	86
6.6.	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	87
6.6.1.	Gangguan Yang Terjadi	87

6.6.2.	SKPD Yang Terlibat Dalam Penanganan Ketertiban dan Ketertiban Umum	88
6.6.3.	Penggulangan dan Kendala	88
6.6.4.	Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Penggulangan	89

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015	4
Tabel.1.2 Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut kelompok usia Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015	4
Tabel 1.3. Jumlah Pencari Kerja Baru Dirinci menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015	5
Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku 2012-2015.....	6
Tabel 3.1. Dasar Pemungutan Pajak Terhadap Jenis Pajak/Retribusi Daerah	19
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2015 dengan TA 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	21
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Dana Pertimbangan TA 2015 dengan TA 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	24
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2016 dengan TA 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	24
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pendapatan Kota Jambi TA 2016 (sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	24
Tabel 3.6. Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	28
Tabel 3.7. Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	28
Tabel 3.8. Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi TA 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	29
Tabel 3.9. Komposisi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	30
Tabel. 3.10. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)	31
Tabel 4.1. Penghargaan Bidang Pendidikan yang diterima	

	Pemerintah Kota Jambi Tahun 2015	33
Tabel 6.1.	Daftar Izin Prinsip Yang Terbit Tahun 2015	80
Tabel 6.2.	Memorandum Of Understanding yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Jambi dengan pihak ketiga Tahun 2015	81
Tabel 6.3.	Kejadian Kebakaran Tahun 2015 Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Perkembangan Inflasi Kota Jambi.....	7
Gambar 1.2. Perbandingan Inflasi (yoy) Kota Jambi dan Kota Lainnya di Pulau Sumatera Triwulan III 2016	8
Gambar 3.1. Persentase Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2016	22
Gambar 3.2. Capaian Target Hasil Dana Perimbangan Pemerintah Kota Jambi T.A 2016.....	23
Gambar 3.3. Persentase Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2016	25
Gambar 3.4. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pembentukan Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2016.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1040);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 15).

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan “Tanah Pilih Pusako Betuah”. Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Luas Kota Jambi 205,38 Km yang terdiri dari :

a) Kecamatan Kotabaru	= 77,78 Km	(37,87 %)
b) Kecamatan Jambi Selatan	= 34,07 Km	(16,59 %)
c) Kecamatan Jelutung	= 7,92 Km	(3,86 %)
d) Kecamatan Pasar Jambi	= 4,02 Km	(1,96 %)
e) Kecamatan Telanaipura	= 30,39 Km	(14,80 %)
f) Kecamatan Danau Teluk	= 15,70 Km	(7,64 %)
g) Kecamatan Pelayangan	= 15,29 Km	(7,44 %)
h) Kecamatan Jambi Timur	= 20,21 Km	(9,84 %)

Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°30'1,67" Bujur Timur sampai 103°40'0,22" Bujur Timur. 01°30'2,98" Lintang Selatan sampai 01°40'1,07" Lintang Selatan.

Geografi wilayah Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan luas 20.538 ha atau 205,38 Km². Topografi wilayah Kota Jambi terdiri dari sebagian besar datar (0-2%), bergelombang (2-15%), dan sedikit curam (15-40%) dengan luas kemiringan lahan masing-masing sebagai berikut :

a) Datar (1-2%)	= 11.326 ha
b) Bergelombang (2-15%)	= 8.081 ha
c) Curam (15 – 40%)	= 41 ha

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kisaran 10 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut.

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat).

Selama tahun 2016 rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,2°C sampai 27,5°C. Dengan suhu maksimum 35,2°C yang terjadi pada bulan Nopember dan suhu minimum 21,0°C terjadi pada bulan Agustus.

Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2016 beragam antara 34,6 mm sampai 345,2 mm, dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai 26 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 11 knots hingga 22 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 76% - 86%.

1.2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2015 tercatat 579.067 jiwa, dengan kepadatan 2.805 orang/km². Kepadatan penduduk menurut Kecamatan adalah:

a) Kecamatan Kotabaru	= 2.109 orang/Km ²
b) Kecamatan Jambi Selatan	= 3.978 orang/Km ²
c) Kecamatan Jelutung	= 7.892 orang/Km ²
d) Kecamatan Pasar Jambi	= 3.132 orang/Km ²
e) Kecamatan Telanaipura	= 3.185 orang/Km ²
f) Kecamatan Danau Teluk	= 764 orang/Km ²
g) Kecamatan Pelayangan	= 874 orang/Km ²
h) Kecamatan Jambi Timur	= 3.921 orang/Km ²

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan (*sex ratio* : 101,17).

Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel.1.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015

No	Penduduk	Jumlah			
		2012	2013	2014	2015
1	Laki-laki	280.121	286.289	285.492	289.713
2	Perempuan	277.094	283.042	282.570	286.354
J u m l a h		557.215	569.331	568.062	576.067
Sex Rasio		101	101	101	101,17

Sumber : Diolah dari Kota Jambi Dalam Angka 2012, 2013, 2014 dan 2015

Tabel.1.2 Jumlah Penduduk Kota Jambi
Menurut kelompok usia Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015

No	Kelompok Usia	Jumlah (orang)			
		2012	2013	2014	2015
1	0 – 14 tahun	154.965	155.431	146.722	148.672
2	15 – 59 tahun	374.062	382.226	387.970	392.119
3	60 tahun +	32.212	31.674	33.370	35.276
J u m l a h		557.215	569.331	568.062	576.067

Sumber: BPS Kota Jambi 2016 (diolah)

Rata-rata Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Jambi adalah 69,91 tahun.

Dari aspek ketenagakerjaan, persentase pekerjaan penduduk Kota Jambi yang berusia diatas 15 tahun adalah :

- | | |
|--|---------|
| 1. Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan..... | 4,98 % |
| 2. Industri Pengolahan | 7,85 % |
| 3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan&Hotel | 35,60 % |
| 4. Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan | 27,68 % |
| Community, Social, and Personal Service | |
| 5. Lainnya (<i>pertambangan dan penggalian, listrik, gas & air, bangunan, angkutan, pergudangan&komunikasi, keuangan,... asuransi, usaha persewaan bangunan</i>) | 23,89 % |

Jumlah pencari kerja baru yang terdaftar sepanjang tahun 2015 mencapai 4.692 orang, tabel berikut adalah rincian pencari kerja menurut tingkat pendidikan.

Tabel 1.3 Jumlah Pencari Kerja Baru
Dirinci menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD (sederajat)	13	1	14
2	SMP (sederajat)	61	20	81
3	SMA (sederajat)	1.835	1.120	2.955
4	SARJANA MUDA	152	338	490
5	S 1	544	592	1.136
6	S 2	10	6	16
	JUMLAH	2.615	2.077	4.692

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2016

1.2.3. KONDISI EKONOMI

1.2.3.1. EKONOMI DAERAH

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2015 sebesar 5,56 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 12,13 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalan yaitu sebesar minus 22,03 persen.

Jika ditinjau menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi Tahun 2015 tetap didominasi oleh usaha yang berkaitan dengan aktivitas perkotaan. Lapangan usaha yang tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan PDRB adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,13%), Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (10,28%), sektor Informasi dan Komunikasi (9,36%), Sektor Jasa Lainnya (7,99%), Sektor Jasa Pendidikan (7,64%), Sektor Jasa Perusahaan (6,82%), Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,42%), serta Sektor Transportasi dan Pergudangan (5,70%), seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kota Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2015 (persen)

No	Uraian	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,34	5,45	2,02
2	Pertambangan dan Penggalian	2,87	0,78	-22,03
3	Industri Pengolahan	6,05	6,58	5,17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,03	11,78	3,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,52	3,26	2,97
6	Bangunan	27,58	4,07	2,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,20	13,41	12,13
8	Transportasi dan Pergudangan	8,58	8,21	5,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,35	20,07	4,10
10	Informasi dan Komunikasi	5,43	3,82	9,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,18	3,35	1,85
12	Real Estate	4,20	4,02	2,43
13	Jasa Perusahaan	2,49	6,16	6,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	14,63	6,42
15	Jasa Pendidikan	2,81	1,32	7,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,77	15,51	10,28
17	Jasa Lainnya	2,56	3,25	7,99
	PDRB	8,50	8,17	5,56

Sumber : BPS Kota Jambi 2016

b. Struktur Ekonomi

Dalam pembentukan struktur perekonomian di Kota Jambi berdasarkan PDRB Seri 2010 atas dasar harga berlaku tahun 2015, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 12,13 persen. Selanjutnya Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 10,28 persen dan kemudian diikuti oleh Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,36 persen.

Sedangkan 3 sektor yang memberikan kontribusi terendah berturut-turut adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,02 persen, sektor Keuangan dan Asuransi sebesar 1,85 persen dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 22,03 persen.

Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Seri 2010 Atas Dasar Harga berlaku Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 1.2.

c. Pendapatan Per kapita

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Kota Jambi dapat dilihat melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Berdasarkan atas harga berlaku, PDRB perkapita Kota Jambi pada tahun 2013 sebesar 16,58 juta rupiah, meningkat menjadi 18,97 juta rupiah pada tahun 2014 dan menjadi 21,31 juta rupiah pada tahun 2015.

d. Tingkat inflasi

Pada triwulan III-2016 Inflasi Kota sebesar 3,93 persen (yoy). Inflasi Kota Jambi lebih tinggi dari inflasi Provinsi Jambi yang tercatat 3,86 persen (yoy) dan juga Inflasi Nasional yaitu sebesar 3,07 persen. (gambar 1.1).

Gambar 1.1
Perkembangan Inflasi Provinsi dan Nasional

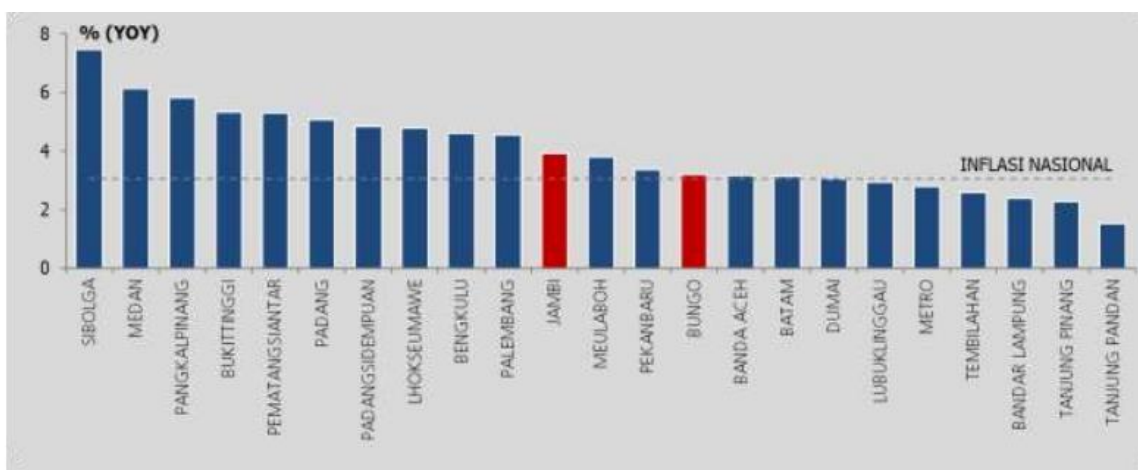


sumber : Bank Indonesia

Inflasi Kota Jambi terjadi pada kelompok pengeluaran barang dan jasa karena kenaikan indeks. Namun penyumbang inflasi tertinggi di Kota Jambi pada kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau. Penyumbang kedua pada kelompok Pendidikan, Rekreasi, Olahraga

Tingkat inflasi di Kota Jambi berada di urutan ke-11 (sebelas) dari 23 kota di Sumatera. Inflasi tertinggi terjadi di kota Sibolga, sedangkan inflasi terendah terjadi di Tanjung Pandan. (gambar 1.4).

Gambar 1.2.
Perbandingan Inflasi (yoy) Kota Jambi dan Kota Lainnya
di Pulau Sumatera Triwulan III 2016



sumber : Bank Indonesia

1.3. POTENSI UNGGULAN DAERAH

a. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Lapangan usaha sektor perdagangan merupakan andalan perekonomian Kota Jambi, terdapat beberapa bidang usaha yang merupakan peluang dan potensi untuk dikembangkan, yaitu :

1. Perdagangan besar, retail dan tradisional
2. Pengembangan dan Pembangunan restoran dan rumah makan
3. Pengembangan resort wisata
4. Pengembangan produk perhotelan

b. Pengangkutan dan Komunikasi

Sebagai kawasan perkotaan, mobilitas masyarakat sangat tinggi untuk memobilisasi sumberdaya yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk memenuhi permintaan akan layanan transportasi dan komunikasi terdapat peluang potensi usaha untuk dikembangkan, yaitu :

1. Pengembangan Teknologi Informasi

2. Pengembangan pelabuhan sungai Batanghari untuk kegiatan industri dan pariwisata
3. Pengembangan transportasi darat untuk angkutan umum

c. Industri Pengolahan

Kota Jambi memiliki potensi khas yang memiliki citarasa dan corak tersendiri, kekhasan ini memiliki peluang ekonomi yang cukup menjanjikan dengan pengelolaan aktivitas dengan pola industrial yang berorientasi pada pasar regional dan nasional. Adapun potensi yang dapat dikembangkan adalah:

1. Kerajinan tradisional khas Jambi (batik, songket dan sulaman emas)
2. Makanan khas Jambi
3. Industri makanan dan minuman dalam kemasan
4. Industri Pengolahan/Kerajinan Hasil Perkebunan dan Kehutanan

d. Jasa-jasa

1. Usaha jasa biro perjalanan
2. Jasa Perbankan dan Keuangan lainnya
3. Jasa Pendidikan
4. Pelayanan Kesehatan
5. Hiburan dan Olahraga

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. VISI MISI

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasaran perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi periode 2013-2018, telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Jambi, yaitu sebagai berikut :

Visi

“ TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA”

Batasan konsep terhadap ide yang terdapat dalam visi diatas adalah sebagai berikut :

- **Pusat Perdagangan dan Jasa** : sesuai dengan rencana pola ruang dan rencana zonasi RTRWK, pusat perdagangan dan jasa merupakan kawasan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal maupun regional
- **Berbasis Masyarakat** : berbasis masyarakat merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menela'ah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan
- **Berakhlak** : Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan
- **Berbudaya** : Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan kedalam 5 Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah
3. Mewujudkan masyarakat kota yang berkualitas, berakhlak, berbudaya dan berdaya saing
4. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*clean governance*)
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bingkai kearifan lokal.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

2.2.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pendekatan yang akan dilakukan pemerintah bersama masyarakat Kota Jambi untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi. Strategi pembangunan secara umum mencakup (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.

Strategi pembangunan daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013–2018 adalah :

1. Pemantapan peran dan fungsi kota
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta
3. Penyediaan ruang yang nyaman dan berkelanjutan
4. Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya
5. Pengembangan kewirausahaan dan penyediaan ruang yang representatif untuk kegiatan perdagangan dan jasa
6. Peningkatan mutu dan akses pendidikan
7. Peningkatan mutu dan akses kesehatan
8. Peningkatan toleransi antar umat beragama
9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
10. Penurunan angka kelahiran
11. Peningkatan peran perempuan di pemerintahan
12. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik
13. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
14. Peningkatan penanganan dan pelayanan PMKS
15. Penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan olah raga
16. Peningkatan jumlah dan kualitas tujuan wisata

2.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan merupakan langkah nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang dijalankan guna pencapaian visi. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan dan menata sarana dan prasarana perhubungan
3. Menata, mengelola dan memantapkan ruang kota dan LH
4. Meningkatkan dan memperluas RTH
5. Meningkatkan kinerja dan cakupan pengelolaan persampahan
6. Mendorong dan meningkatkan tumbuh kembangnya wirausaha baru
7. Meningkatkan rasio populasi usia sekolah
8. Meningkatkan mutu tenaga pendidik
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
10. Meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis
11. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
12. Meningkatkan pelayanan kesehatan
13. Meredam potensi konflik antar umat beragama
14. Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja
15. Mendorong partisipasi aktif pasangan usia subur
16. Meningkatkan porsi perempuan dalam jabatan pemerintahan
17. Menerapkan SOP dalam pelayanan publik
18. Menerapkan mekanisme penilaian kinerja aparatur dan standar pelayanan minimal
19. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan penanganan PMKS
20. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
21. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda, seni budaya dan olahraga
22. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana tujuan wisata
23. Memberdayakan lembaga adat dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah
24. Meningkatkan promosi dan pelayanan kepariwisataan

2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan visi, misi melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka telah disusun program-program pembangunan beserta indikator kinerja daerah yang diharapkan dapat tercapai selama kurun waktu 5 tahun periode RPJMD 2013–2018. Indikator

kinerja daerah akan diimplementasikan oleh SKPD terkait melalui target kinerja tahunan yang terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan *sustainable development*.

Adapun prioritas pembangunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur,
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
3. Percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dan investasi
4. Tata kelola pemerintahan yang baik,
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup,
6. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2016, 6 (enam) program prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

2.3.1. Percepatan peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur

Dalam rangka mendukung perkembangan aktivitas masyarakat dan perekonomian yang semakin meningkat, maka perlu penyediaan infrastruktur yang seimbang. Infrastruktur fisik di Kota Jambi belum seimbang dengan perkembangan tersebut, akibatnya terjadi permasalahan transportasi darat (kemacetan), banjir, sampah, dan sanitasi kota. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkualitas. Infrastruktur yang berkualitas disamping akan meningkatkan akses masyarakat juga akan meningkatkan daya saing Kota Jambi.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) program yaitu ;

- 1) Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- 2) Program pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- 3) Program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
- 4) Program pembangunan dan pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan
- 5) Program pengendalian dan pemanfaatan ruang
- 6) Program peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan
- 7) Program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman berbasis kawasan
- 8) Program peningkatan mutu dan perluasan kapasitas pelayanan perparkiran
- 9) Program peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan
- 10) Program perencanaan tata ruang

2.3.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Oleh karena itu pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hal ini akan tercermin dari makin tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendapatan penduduk, serta dimilikinya nilai budaya yang berorientasi ke masa depan.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kota Jambi akan dilaksanakan 6 (enam) program sebagai berikut ;

- 1) Program peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan
- 2) Program pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan
- 3) Program Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata
- 4) Program pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- 5) Program peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
- 6) Program peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan.

2.3.3 Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi

Kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini sangat ditentukan oleh nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Berkenaan hal tersebut Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan UMKM memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu IKM dan UMKM menjadi perhatian khusus melalui pola pengembangan kebijakan yang terarah sehingga IKM dan UMKM akan menjadi motor penggerak perekonomian sektor riil di Kota Jambi.

Untuk mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan tersebut maka sasaran yang akan diwujudkan adalah meningkatkan produktivitas UMKM, IKM dan aktivitas perekonomian, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta penataan PKL dan pasar-pasar tradisional. Sasaran ini akan diwujudkan dengan melaksanakan 9 (sembilan) program sebagai berikut :

- 1) Program pengembangan sentra-sentra perdagangan dan industri
- 2) Program pembinaan, pengembangan dan peningkatan pengawasan industri dan perdagangan
- 3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
- 4) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- 5) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- 6) Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani
- 7) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 8) Program peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran

- 9) Program peningkatan produksi, mutu produk, dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan

2.3.4. Tata kelola pemerintahan yang baik

Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan dan melaksanakan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam mengelola sumber daya daerah, pemerintah kota Jambi harus memiliki sumber daya aparatur yang berkualitas yaitu memiliki kemampuan teknis dan manajerial, serta komitmen yang tinggi agar dapat menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan *good governance* dan kemandirian daerah.

Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong optimalisasi pranata pemerintahan adalah : Menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki kapabilitas, integritas, berkualitas dan akuntabel melalui 25 (dua puluh lima) program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan kualitas dan pengelolaan pelayanan publik
- 2) Program pemberdayaan kecamatan dan kelurahan
- 3) Program peningkatan kerja sama daerah
- 4) Program tata kelola organisasi pemerintahan dan administrasi pembangunan
- 5) Program peningkatan tata kelola adm. kependudukan
- 6) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur dan keprotokolan
- 7) Program pemeliharaan dan penyelenggaraan tramtibum serta penegakan regulasi daerah
- 8) Program penataan peraturan perUU dan penyelesaian perkara pemerintah daerah
- 9) Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan Setda dan kerumahtanggaan
- 10) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
- 11) Program peningkatan pelayanan kedinasan
- 12) Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD
- 13) Program peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 14) Program peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah
- 15) Program optimalisasi penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi
- 16) Program pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas bagi orkemas dan parpol
- 17) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
- 18) Program perencanaan tata ruang
- 19) Program pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- 20) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 21) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 22) Program peningkatan disiplin aparatur
- 23) Program Peningkatan, pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
- 24) Program perencanaan SKPD
- 25) Program pengembangan data dan informasi

2.3.5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan

Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap lingkungan sehingga mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang dikehendaki. Apabila hal ini tidak diantisipasi maka akan muncul dampak negatif seperti penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan. Permasalahan lingkungan di Kota Jambi, lebih disebabkan oleh faktor internal sebagai dampak dari aktivitas penduduk Kota Jambi seperti sanitasi lingkungan, persampahan dan polusi udara serta air yang disebabkan oleh aktivitas lokal. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi ke langsunan hidup masyarakat, maka akan dilaksanakan 3 (tiga) program dibawah ini :

- 1) Program peningkatan pengelolaan lingkungan, RTH, ruang publik dan keanekaragaman hayati
- 2) Program peningkatan pengelolaan persampahan
- 3) Program penurunan beban pencemaran

2.3.6. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi dimana masyarakat kota Jambi dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Masih tingginya angka pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta angka vertilitas merupakan isu pokok kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah kota Jambi telah merumuskan upaya-upaya konkrit jangka pendek, seperti melakukan pelatihan, pembinaan dan pemberian bantuan usaha kepada masyarakat yang membutuhkan masih terus dilakukan.

5 (lima) Program yang dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut :

- 1) Program keluarga berencana dan keluaraga sejahtera
- 2) Program koordinasi keagamaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS
- 4) Program peningkatan kesetaraan gender dan perempuan dan perlindungan anak
- 5) Program peningkatan kualitas,perlindungan dan produktivitas tenaga kerja

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Jambi, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada komponen pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan, yang mana datanya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Jambi yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut.

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-sumber Penerimaan Daerah diperoleh dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sampai dengan tahun 2016 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan lain yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Dasar Pemungutan Pajak terhadap Jenis Pajak/Retribusi Daerah

NO	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	DASAR PEMUNGUTAN (Perda Kota Jambi)
1.	Retribusi Jasa Umum	Perda No.08 Tahun 2015
2.	Retribusi Jasa Usaha	Perda No.09 Tahun 2015
3.	Retribusi Tertentu	Perda No.10 Tahun 2015

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dimana realisasi dicapai sesuai dengan rencana/target dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan/penerimaan pajak dan retribusi daerah, pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Kota Jambi melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan pajak dan retribusi daerah guna mendapatkan data potensi pajak dan retribusi daerah dari obyek pajak dan retribusi daerah.
- Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan daerah guna mendapatkan data obyek pajak daerah yang lebih akurat.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data objek pajak dan retribusi daerah. Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah.
- Penyelesaian serta pengecekan atas keberatan Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah.
- Penagihan atas tunggakan Pajak kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- Terlaksananya tertib administrasi ketetapan dan administrasi tunggakan Pajak/Retribusi Daerah.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.622.710.103.775,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.571.371.681.548,47 (96.84 %) yang bersumber dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari :

- Hasil Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

a. Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2016 mencapai Rp 287.564.676.504,49 atau 90,87 % dari target penerimaan sebesar Rp 316.463.773.600,00 dan memberikan kontribusi sebesar 19,50 % terhadap pendapatan Kota Jambi Tahun 2016 (mengalami peningkatan sebesar 103,71 % dibandingkan tahun 2015). Jika dibandingkan dengan jumlah Penerimaan PAD Tahun 2015 yakni sebesar Rp 263.925.520.119,42 maka PAD Tahun 2016 meningkat 8,96 % atau naik Rp 23.639.156.385,07.

Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2015 dengan Tahun 2016.

Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2015 dengan TA 2016
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

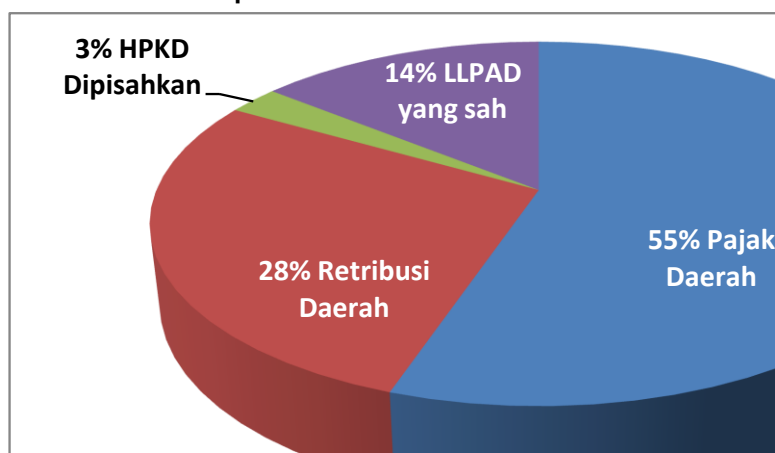
No	Uraian	Target 2015 (000)	Realisasi 2015 (000)	% Realisasi	Target 2016 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	190.882.000	147.890.732	77,48	187.252.000	158.740.884	84,77
2.	Ret. Daerah	63.057.026	58.815.152	93,27	73.679.471	80.718.526	109,55
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg di pisahkan	7.800.000	7.974.858	102,24	8.000.000	7.266.051	90,83
4.	Lain-lain PAD yg sah	43.399.917	49.378.173	113,77	47.532.302	40.839.214	85,92
TOTAL		305.138.943	264.058.916	86,54	316.463,773	287.564.676	90,87

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Diketahui bahwa komponen hasil pajak daerah tidak mencapai target yang telah direncanakan semula. Dari target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 187.252.000.000,00 ternyata realisasinya hanya mencapai Rp 158.740.884.098,89 atau 84,77 %. Sedangkan realisasi Retribusi Daerah melampaui target yang telah ditetapkan (109,55%). Untuk PAD yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2016 ini juga tidak mencapai target (90,83 %), begitu pula dengan PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85,92%.

Gambar berikut menunjukkan kontribusi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi Tahun 2016.

Gambar 3.1
Persentasi Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2016



b. Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima Kota Jambi terdiri dari pos bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Target dana perimbangan adalah sebesar Rp 1.185.640.446.931,00 dan realisasinya mencapai Rp 1.177.857.284.208,00 atau mencapai 99,34 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut yang menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015 dengan Tahun 2016 di bawah ini:

Tabel 3.3.
Perbandingan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2015 dengan TA 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2015 (000)	Realisasi 2015 (000)	% Realisasi	Target 2016 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi
1.	Bagi Hasil Pajak	68.625.268	48.046.043	70,01	69.794.780	67.631.890	96,90
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	27.292.990	35.296.879	129,33	14.667.864	35.096.083	239,27
3.	Dana Alokasi Umum	668.201.807	668.201.807	100,00	727.564.344	727.564.344	100,00
4.	Dana Alokasi Khusus	107.133.110	107.133.110	100,00	373.613.457	347.564.966	93,03
TOTAL		871.253.175	858.677.839	98,56	1.185.640.446	1.177.857.284	99,34

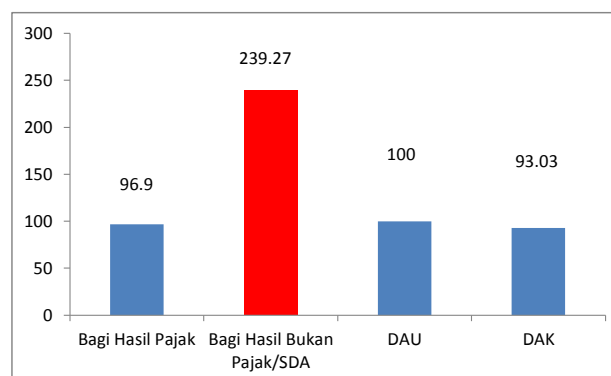
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Pos bagi hasil pajak dan bukan pajak terdiri dari : bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil PPh pasal 21, 25 dan 29 serta bagi hasil bukan pajak/SDA. Target pos bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar Rp 84.462.645.331,00 realisasinya mencapai Rp 102.727.973.433,00 atau 121,63 %.

Untuk Bagi Hasil Pajak saja terealisasi 96,90 % (Rp 67.631.890.258,00) dari target Rp 69.794.780.998,00. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak/SDA terealisasi Rp 35.096.083.175,00 (239,27 %) dari target Rp 14.667.864.333,00.

Target penerimaan dari pos Dana Alokasi Umum tahun 2016 adalah sebesar Rp 727.564.344.000,00 dan realisasinya mencapai Rp 727.564.344.000,00 atau 100 %, sedangkan pada penerimaan dari Pos Dana Alokasi Khusus hanya mencapai realisasi sebesar 93,03 % yaitu Rp 347.564.966.775,00.

Gambar 3.2.
Capaian Target Hasil Dana Perimbangan
Pemerintah Kota Jambi T.A 2016



Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Jambi Tahun 2016

c. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terakhir Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi. Selama tahun 2016, semula ditargetkan Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp 77.180.986.244,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.598.538.835,98 (86,29 %). Sedangkan pendapatan hibah sebesar Rp 39.039.797.000,00 teralisasi sebesar Rp 39.039.797.000,00 (100 %), untuk dana penyesuaian dan otonomi khusus yang semula tidak ditargetkan memperoleh realisasi sebesar Rp 311.385.000,00. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya semula ditargetkan sebesar Rp 4.385.100.000,00 terealisasinya nihil. Dengan demikian Total Target

pendapatan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp 120.605.883.244,00 sedangkan total realisasi yang tercapai sebesar Rp 105.949.720.835,98 atau sebesar 87,85%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015 dengan Tahun 2016 di bawah ini:

Tabel 3.4.
Perbandingan Target dan Realisasi LLPDyS TA 2015 dengan TA 2016
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target 2015 (000)	Realisasi 2015 (000)	% Realisasi	Target 2016 (000)	Realisasi 2016 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	0	0	0	39.039.797	39.039.797	100
2.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya	68.737,652	73.840.521	107,42	77.180.986	66.598.538	86,29
4.	Dana Penyesuaian Otsus	182.508.791	182.778.371	100,15	0	311.385	-
5.	Bantuan Keuangan dr Provinsi Jambi	8.000.000	8.000.000	100	4.385.100	0	0
TOTAL		259.246.443	264.618.892	102,07	120.605.883	105.949.720	87,85

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

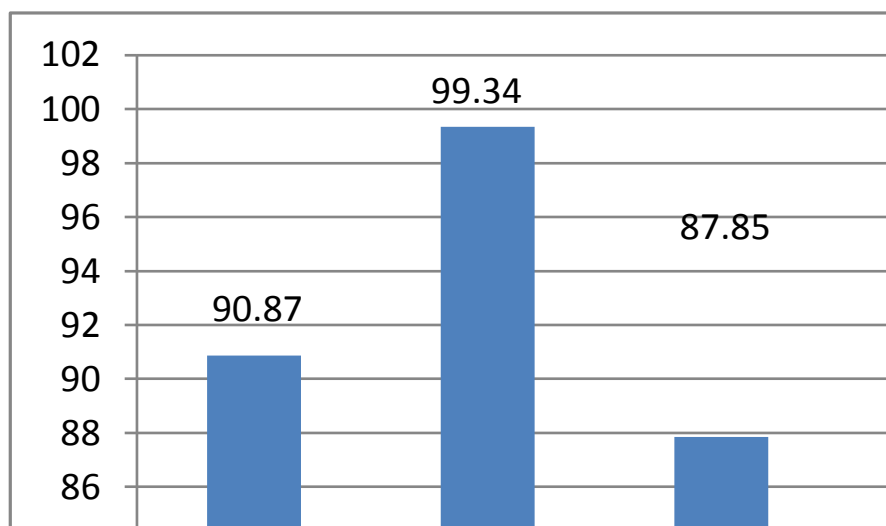
Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi penerimaan daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total pendapatan daerah adalah Rp 1.571.371.681.548,47 atau terealisasi 96,84 % dari target sebesar Rp 1.622.710.103.775,00 Target dan realisasi pendapatan Kota Jambi Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.3 berikut.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Jambi TA 2016
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

Dalam Rp.000,-

No	Jenis	Target	Realisasi	% dari Target
1	PAD	316.463.773	287.564.676	90,87
2	Dana Perimbangan	1.185.640.446	1.177.857.284	99,34
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	120.605.883	105.949.720	87,85
	Total	1.622.710.103	1.571.371.681	96,84

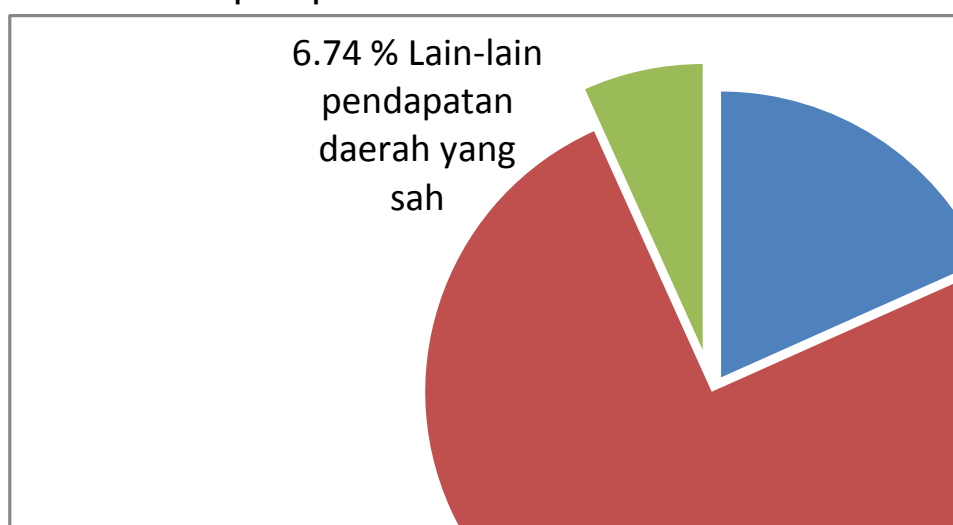
Gambar 3.3
Persentase Realisasi Pendapatan
Kota Jambi T.A 2016



Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Selanjutnya, jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 18,30% dari total pendapatan Kota Jambi Tahun 2016. Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 74,96% dan sisanya sebesar 6,74% ialah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Gambar 3.4
Persentase Kontribusi komponen pendapatan terhadap total pembentukan
pendapatan daerah Kota Jambi T.A 2016



Kontribusi PAD Kota Jambi yang sebesar 18,30% di Tahun 2016 ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rerata kontribusi PAD Kabupaten/Kota secara nasional yang hanya berada dikisaran 8,5 % di Tahun 2016. Namun angka masih menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pusat.

3.1.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,96 % dari tahun 2015. Sementara itu, dari sisi penerimaan hasil pajak daerah sebesar Rp 158.740.884.098,89 (84,77 %) dari target 187.252.000.000,00 pada tahun 2016 ini. Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

- Masih adanya wajib pajak tidak menyampaikan informasi tentang pindah alamat maupun tutup usaha, yang berdampak pada ketidak akuratan data pajak, sehingga menyulitkan operasional pendataan dilapangan.
- Masih ditemuinya wajib pajak menyampaikan data-data tempat usaha tidak secara lengkap
- Masih ada pemasangan reklame dilapangan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme/prosedur perizinan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.
- Terbatasnya tenaga teknis (staf) dalam Pendataan, penyampaian dan penagihan tunggakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- Masih banyaknya piutang/Retribusi Daerah yang sulit ditagih karena sudah tutup usaha atau pindah alamat tanpa memberikan informasi.
- Belum adanya sistem komputerisasi yang online pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebabkan pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
- Kewajiban Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih kurang.
- Sanksi/punishment bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melalaikan kewajiban membayar Pajak/Retribusi belum Optimal.

b. Solusi

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf serta keterlibatan RT untuk melaksanakan operasional pendataan pajak dilapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/ retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga tehnik untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.

- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada UU.
- Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi pemungut.
- Penerapan Sanksi agar lebih tegas.

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Perwujudan pelayanan publik di Daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian Daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah merupakan seluruh Pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/ kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

3.2.2. Target dan Realisasi

Pada Tahun 2016 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah sebesar Rp 1.712.022.855.320,00 yang terdiri dari Belanja Langsung Rp 869.237.431.087,00 dan Belanja Tidak Langsung Rp 842.785.424.233,00. Jika dibanding dengan jumlah anggaran Belanja tahun 2015 sebesar Rp 1.605.268.716.043,00 maka tahun 2016 ini Belanja Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 6,65 %.

Tabel 3.6.
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 (sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No.	Uraian	Anggaran Belanja	%
1.	Belanja Tidak Langsung	869.237.431.087,00	50,77
2.	Belanja Langsung	842.785.424.233,00	49,23
TOTAL BELANJA		1.712.022.855.320,00	

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 50,77 % dari total belanja Kota Jambi di Tahun 2016 dan sisanya sebesar 49,23 % merupakan Belanja Langsung.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 842.785.424.233,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 735.466.555.433,50 atau 87,27 % (sebelum dilakukan audit BPK-RI) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2016 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

		Tahun Anggaran 2016 (Setelah Perubahan)		
No	Uraian	Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung	%
1.	Belanja Pegawai	823.075.966.776,00	721.853.145.334,50	87,70
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0
3.	Belanja Subsidi	321.744.000,00	0,00	0
4.	Belanja Hibah	9.920.750.000,00	9.682.097.750,00	97,59
5.	Belanja Bantuan Sosial	2.267.000.000,00	1.557.150.000,00	68,69
6.	Belanja Tidak Terduga	1.522.731.057,00	1.082.029.949,00	71,06
7.	Belanja Bantuan Keuangan	5.677.232.400,00	1.292.132.400,00	22,76
TOTAL BELANJA		842.785.424.233,00	735.466.555.433,50	87,27

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja Langsung pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 869.237.431.087,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 791.239.412.542,95 atau 91,03%, sebelum dilakukan audit oleh BPK- RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, dan APBN Pemerintah. Adapun perincian Belanja Langsung pada T.A. 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Pegawai	68.751.697.118,00	62.458.092.882,00	90,85
2.	Belanja Barang dan Jasa	350.835.594.874,00	304.585.364.771,00	86,82
3.	Belanja Modal	449.650.139.095,00	424.195.954.889,95	94,34
TOTAL BELANJA		869.237.431.087,00	791.239.412.542,95	91,03

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

Untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 masih menunggu proses audit pihak BPK, yang bila telah selesai akan disampaikan secara lebih rinci didalam Nota Keuangan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016.

3.2.3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- Penyampaian laporan keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung oleh SKPD sering sangat terlambat dan menghambat proses pengelolaan keuangan daerah.
- Rentang waktu pelaksanaan APBD menjadi singkat karena lambatnya proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran.
- Kurangnya Pemahaman Pengelola Administrasi keuangan SKPD dalam mengelola administrasi dan pelaporan keuangan.

b. Solusi

- Melaksanakan sosialisasi mengenai penatausahaan keuangan daerah.
- Memantapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKADA)
- Sinergi antar sistem pengelolaan keuangan seperti SIMDA dan SIPKD

3.2.4. Rencana dan Realisasi Pembiayaan

Otonomi daerah yang bergulir dan berlaku efektif mulai Tahun 2001 telah memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan model penganggaran yang tidak hanya berpijak pada model anggaran berimbang saja. Pemerintah Daerah bisa menggunakan model penganggaran lain, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit dalam APBD

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Jambi, maka penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Jambi yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan rincian Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kota Jambi :

Tabel 3.9.
Komposisi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2016
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	130.050.513.198,00	130.050.513.198,74	100
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.737.761.653,00	40.731.598.758,00	99,98

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Besarnya Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp 130.050.513.198,00 dan realisasi Rp 130.050.513.198,74 atau 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.10.
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

Uraian	Target	Realisasi	%
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya (dari Belanja barang dan jasa)	130.050.513.198,00	130.050.513.198,74	100

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sedangkan untuk Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp 40.737.761.653,00 dan realisasi Rp 40.731.598.758,00 atau 99,98 % (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Adapun perincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.11.
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

Uraian	Target	Realisasi	%
Penyertaan Modal (Investasi)	39.039.797.000,00	39.039.796.578,00	100
Pemerintah	1.697.964.653,00	1.691.802.180,00	99,64
Pembayaran Pokok Utang			

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2016

BAB IV

PENYELENGGAAN

URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. URUSAN WAJIB

4.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

Guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional, maka Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi Yang Berakhlak, Berbudaya, dan Berdaya Saing” dengan Misi “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”.

Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang memiliki Visi; “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat”, dengan misi sebagai berikut : 1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan; 2). Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan; 3). Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan; 4). Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan; 5). Menjamin kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan; dan 6). Melestarikan dan memperkuat Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

Sebagaimana kebijakan pemerintah Kota Jambi yang ingin mewujudkan sumber daya manusia Kota Jambi yang produktif dan berdaya saing” maka, melalui program Tiga Tahun Kota Jambi Bangkit, untuk bidang pendidikan pemerintah Kota Jambi telah meluncurkan program sekolah bebas pungutan dan pemberian beasiswa bagi semua siswa miskin, serta kegiatan pengadaan pakaian seragam dan peralatan sekolah dari tingkat SD sampai SMA/SMK bagi siswa kurang mampu yaitu di tiga Sekolah Swasta di Kota Jambi Melalui program ini diharapkan tidak ada lagi putra-putri daerah Kota Jambi yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp. 594.776.610.584,- terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp. 537.062.217.084,-
Belanja Langsung sebesar	<u>Rp. 57.714.393.500,-</u>
Jumlah	Rp. 594.776.610.584,-

Jika dibandingkan dengan Total Belanja APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp. 1.712.022.855.320,- maka persentase anggaran untuk belanja fungsi pendidikan adalah sebesar 34,74 persen. Angka ini telah memenuhi persentase minimal yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 2, ayat (1) bahwa Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen). Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap seluruh belanja APBD. Pasal 3 disebutkan bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja hibah. Pasal 6 menyatakan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru, dan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru.

Pada tahun anggaran 2016, anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk membiayai program dan kegiatan urusan pendidikan yang telah dilaksanakan baik untuk peningkatan sarana/prasarana maupun peningkatan mutu, yaitu; Program pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.598.620.000,- terealisasi Rp. 3.146.451.399,- (87,43%), Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.590.592.500,- terealisasi Rp. 1.431.002.020,- (89,97%), Program peningkatan disiplin aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.403.000.000,- terealisasi Rp. 2.393.142.000,- (99,59%), Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.000.000,- terealisasi Rp. 237.174.830,- (73,20%), Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.921.000,- terealisasi Rp. 58.796.000,- (98,12%), Program Perencanaan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.420.000,- terealisasi Rp. 32.420.000,- (100%), Program Pengembangan Data/Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.470.000,- terealisasi Rp. 289.564.500,- (65,15%), Program

Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.261.370.000,- terealisasi Rp. 46.347.180.349,- (94,08%).

Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang pendidikan, indikator kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia sekolah pada tahun 2016 ditargetkan 82,10%, terealisasi 93.15%. Indikator kinerja utama Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pada tahun 2016 ditargetkan 11,05%, sampai saat ini belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan data BPS belum dipublikasikan. Indikator kinerja utama jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2016 ditargetkan 91,57%, terealisasi sebesar 88,91%. Indikator kinerja utama jumlah sekolah sesuai SNP pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016 ditargetkan 75%, terealisasi sebesar 73%.

Permasalahan yang dihadapi didalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan pada umumnya tidak terlalu signifikan sehingga dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan pendidikan antara lain adalah keterbatasan waktu dan lokasi sekolah yang akan dilaksanakan sebagian besar berada pada daerah dengan topografi yang berada di atas rawa.

Adapun prestasi yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel : 4.1
Penghargaan Bidang Pendidikan
Yang diterima Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016

No	NAMA PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	YANG MEMBERI PENGHARGAAN
1	Kihajar Award	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Siswa/Guru	Prestasi Nasional	Nama Sekolah/Lembaga	Jenis Lomba
A. Kepala Sekolah				
1	Drs. Firdaus	Juara Nasional	SMP Negeri 4 Kota Jambi	Sekolah Adiwiyata Mandiri Kategori SMP
2	Budiyanto, M.Pd	Juara Nasional	SMP Negeri 7 Kota Jambi	Sekolah Adiwiyata Nasional Kategori SMP
3	Sujono, M.Pd	Juara Nasional	SMK Negeri 4 Kota Jambi	Sekolah Adiwiyata Nasional Kategori SMK
4	Supaini, S.Pd	Juara Nasional	SD Negeri 60 Kota Jambi	Sekolah Adiwiyata Nasional Kategori SD

5	Jamil, S.Pd		Juara 1	SMP Negeri 24 Kota Jambi
6	Witzir, S.Pd	Juara 3	SD IT Nurul Ilmi Kota Jambi	Lomba Budaya Mutu SD Swasta Komponen Pembelajaran
B. Guru				
1	Dr. Sofyan, M.Pd	Juara 1	SMA Negeri 2 Kota Jambi	Inovasi Pembelajaran
2	Solbi, M.Pd	Juara 1	SMA Luar Biasa Prof.Dr. Sri Soedewi MS	Menulis Artikel pada Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional
3	Nopi Arahman	Juara 1	Instruktur PalComTech Jambi	Apresiasi GTK PAUD dan Dimas Tingkat Nasional Kategori Instruktur Kursus
4	Kemas Sudirman, SPd.I	Juara 2	SD Negeri 70 Kota Jambi	Guru Pendidikan Agama Islam
5	Yul Pendri, M.Pd	Juara 3	SD Negeri 47 Kota Jambi	Lomba Karya Tulis Ilmiah
C. Siswa				
1	Aulia Murti	Juara 1	SMP Negeri 1 Kota Jambi	Lomba Cipta Puisi Tingkat Sekolah Pertama
2	Theodorico Liwandi Lutan	Juara 1	SMK Unggul Sakti	Debat Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Siswa SMK tingkat Nasional
3	Elora Maulina	Juara 1	SD Islam Al Falah Jambi	Lomba Cipta Pantun dalam Apresiasi Sastra Siswa SD
4	Gempita Anjaly Pierda	Juara 1	SMK Negeri 2 Kota Jambi	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (Penulis Cerpen)
5	Zairliana Mayanti		Juara 1	SD Negeri 181 Kota Jambi
6	Axel Keefe Beltsazar		Juara 1	SD Xaverius 2 Kota Jambi
7	Chelsea Rasita Rehulina Sembiring		Juara 1	SD Xaverius 2 Kota Jambi
8	Nanda Yolani Pratiwi		Juara 1	SD Negeri 140 Kota Jambi
9	Keyza Fajar Azzaky		Juara 1	SD Al Falah Kota Jambi
10	Nayla Brigita Putri		Juara 1	SD Negeri 74 Kota Jambi
11	Eunike Felice		Juara 1	TK Xaverius 2
12	Cintya Aura Diya		Juara 1	SMA Negeri 6 Kota Jambi

13	Christdanmark Hutaaruk	Juara 1	SD Kristen Bina Kasih Jambi	Kejuraan Gavrila Gymnastic International Festival yang ke 4
14	Dhiaz Chebastian	Juara 2	SMK Unggul Sakti	LKS IT Software Application
15	Rhesnafia Tri Okta	Juara 2	SMP Negeri 7 Kota Jambi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Karate (Komite Putri)
16	Benekditus Sidharta	Juara 2	SDS Xaverius 1 Kota Jambi	Olimpiade Sains Nasional bidang IPA
17	Sonia Ariani S	Juara 2	SMP Negeri 5 Kota Jambi	Kejurnas PPLP Panahan Tingkat Nasional
18	Zairliana Mayanti		Juara 2	SD Negeri 181 Kota Jambi
19	Silvi Wulandari	Juara 2	SMP Negeri 6 Kota Jambi	Kejuraan Nasional Judo Junior Klas 40 Kg
20	Tsabitah Aristawati	Juara 3	SMP Negeri 7 Kota Jambi	Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional cabang Lomba Seni Lukis
21	Felicia Priskilla	Juara 3	SMP Kristen Bina Kasih	OSN Matematika Tingkat Nasional
22	Jesslyn	Juara 3	SMK Unggul Sakti	Lomba LKS Accounting
23	Rhesnafia Tri Okta	Juara 3	SMP Negeri 7 Kota Jambi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Karate (Kata Putri)
24	Elsa Nasya	Juara 3	SMP Negeri 11 Kota Jambi	Lomba Penelitian Siswa Nasional
25	M Kemas Ali	Juara 3	SMP Negeri 11 Kota Jambi	Lomba Penelitian Siswa Nasional
26	Fadhillah Ahmadi	Juara 3	SMP Negeri 11 Kota Jambi	Lomba Penelitian Siswa Nasional
27	Angelin Natasya	Juara 3	SMP Negeri 11 Kota Jambi	Kejuaraan Judo antar PPLP se Indonesia
28	Meiranti Ibtria Desti	Juara 3	SMK Negeri 4 Kota Jambi	Pekan Paralympic Nasional Cabang Atletik (Tolak Peluru)
29	Andini Segonang	Juara 3	SMK Negeri 4 Kota Jambi	Pekan Paralympic Nasional Cabang Pentanque
30	Nadia Angraini	Juara 3	SMKS Attaufiq Jambi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pencak Silat Putri
31	Andrew Saputra	Juara 3	SMP Negeri 5 Kota Jambi	Kejurnas PPLP cabang Senam

4.1.2. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dan RSUD H. Abdul Manap. Kesehatan merupakan hak dasar yang wajib diterima oleh setiap manusia. Tanpa adanya taraf kesehatan yang layak dan baik diterima oleh masyarakat, sasaran dan tujuan pembangunan tidak akan dapat tercapai dengan baik. Dapat dikatakan bahwa, sukses atau tidaknya pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh baiknya kualitas kesehatan bangsa tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat suatu bangsa merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, baik itu dari sisi masyarakat, pemerintah dan *stakeholders*. Seluruh komponen tersebut harus secara bersama dan bersinergi bekerja sama membangun kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “peningkatan pelayanan kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan”. Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan mutu dan akses kesehatan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan mutu tenaga medis dan paramedis, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Pembangunan Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Selain itu pembangunan bidang kesehatan Kota Jambi diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, kehadiran sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bagi masyarakat Kota Jambi sangatlah dibutuhkan. Selain biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau, fasilitas dan peralatan yang lengkap, dan kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah Rumah Sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi memberikan

pelayanan kesehatan tanpa membedakan tingkat sosial masyarakat. RSUD H. Abdul Manap melayani pasien umum, pasien pengguna kartu Jamkesmas, Jamkesmasda, Askes/BPJS, Jamsostek, dan Trimitra.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja daerah untuk urusan kesehatan dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 119.179.727.877,- terdiri dari:

• Belanja/ Langsung Dinas Kesehatan Kota Jambi	Rp. 72.158.318.620,-
• Belanja Langsung RSUD. H. Abdul Manap	<u>Rp. 47.021.409.257,-</u>
Jumlah	Rp. 119.179.727.877,-

Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 mengalokasikan belanja langsung untuk 7 (tujuh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan yang telah dilaksanakan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 53,153,595,521,- (73,66%) dari total target anggaran TA 2016 sebesar Rp. 72,158,318,620,-. Sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi pada bidang kesehatan, pada tahun 2016 terealisasi target 100%, 5 unit jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan antara lain, penyusunan program dan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2016, belum mengacu pada penetapan indikator pencapaian 17 (tujuh belas) Sasaran *Grand Strategy* Departemen Kesehatan Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 457/2008, dan disesuaikan pula dengan visi Pemda Kota yaitu “Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya”. Hasil kegiatan program pembangunan kesehatan yang melalui anggaran keuangan tahunan daerah masih belum mengacu pada SPM Kesehatan dengan mempedomani Peraturan Menkes RI Nomor 741/2008 dan yang terakhir, masih ada kegiatan yang tidak dapat teralisasi 100% dikarenakan karena adanya keterlambatan dalam Penetapan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan.

Prestasi yang didapat Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun 2016 antara lain, Juara III Dokter Teladan Tingkat Provinsi Jambi atas nama drg Gubrinaldi dan Juara I Lomba Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi (Puskesmas Simpang Kawat).

RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 mengalokasikan belanja langsung untuk melaksanakan 33 kegiatan dalam 7 program untuk memenuhi 5 sasaran strategik. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 44,309,916,057,- (94,23%) dari total target anggaran 2016 sebesar Rp. 47,021.409,257,-.

Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang kesehatan adalah masih banyak program dan kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan sehingga masih banyak pembenahan bagi pihak rumah sakit untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasana pelayanan di rumah sakit dengan melengkapi peralatan kesehatan, pembenahan ruang dan gedung serta penampilan rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan lebih maksimal. Adapun prestasi yang didapat RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun 2016 adalah sebagai motivator Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak (tingkat Provinsi Jambi).

4.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi. Namun kedepan dengan diterbitkannya PP 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terhitung mulai 1 Januari 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi akan diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada Tupoksi Dinas, artinya tidak hanya sebagai eksekutor dalam upaya peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas serta kontinuitas infrastruktur, akan tetapi juga diharapkan mampu melaksanakan fungsinya sebagai perencanaan, pemanfaatan serta pengawasan pengendalian ruang di Kota Jambi.

Pada tahun 2016 urusan pekerjaan umum dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 332.060.159.601 telah terealisasi sebesar Rp. 315.186.314.165 atau sebesar 94.92% dari total anggaran, dengan capaian realisasi fisik sebesar 97,25%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa silpa yang mencapai 5% lebih dari total anggaran tentunya diharapkan dapat menurun pada masa mendatang, hal ini dapat diwujudkan melalui perbaikan sinergitas internal serta peningkatan kualitas perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Sejalan dengan itu, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Pekerjaan Umum dijabarkan dalam misi 1 (satu) yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan. Dengan indikator kinerja daerah meningkatkan Rasio panjang jaringan jalan dan drainase yang baik serta penurunan luas kawasan kumuh yang bertujuan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas. Pada tahun 2016 urusan pekerjaan umum memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu :

1. Target rasio panjang jaringan jalan yang baik sebesar 82 % atau sepanjang 418,57 km dari total panjang jalan Kota Jambi 510,452 km pada tahun 2016 telah mencapai 90,00% atau sepanjang 459.406,8 km.
2. Rasio panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 80,00% atau sepanjang 97,60 km dari total panjang drainase Kota Jambi 127,2 km dan terealisasi sebesar 84,20% atau sepanjang 107,10 km.
3. Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah sebesar 0,60% atau 413,46 Ha dari total luas kawasan kumuh Kota Jambi seluas 165 Ha dan terealisasi sebesar 0,88% atau seluas 1,19 Ha, pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum fokus pada dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh Kota Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 700 Tahun 2013, akan tetapi kegiatan penanganan tetap dilaksanakan khususnya pembangunan jalan lingkungan dan drainase.

Secara umum urusan pekerjaan umum telah melampaui target indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, akan tetapi tentunya dinilai masih perlu dilakukan peningkatan kualitas serta totalitas penanganan infrastruktur, sehingga umur pembangunan fisik yang dihasilkan lebih lama dan dapat menekan anggaran dalam pemeliharaan rutin nantinya.

4.1.4. URUSAN PERUMAHAN

Urusan Perumahan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Penataan Ruang, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, serta Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang dijabarkan dalam 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 70.034.678.300 dan terealisasi keuangan sebesar Rp. 65.777.866.671 atau sebesar 93,92% dan realisasi fisik sebesar 98,42%.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 pada Urusan Perumahan dijabarkan dalam misi 1 yaitu membangun infrastruktur perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar antara lain cakupan pelayanan jaringan air minum dan kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman serta pengurangan Kawasan Kumuh.

Pada tahun 2016 urusan wajib perumahan memiliki target harus dicapai dalam RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu :

1. Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah sebesar 75% dan terealisasi sebesar 72,25%, dimana mengalami peningkatan 8,25% dari kondisi awal pada akhir tahun 2015 yaitu sebesar 64%.
2. Kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman sebesar 78.41% atau sebanyak 13.421 titik dan terrealisasi sebesar 75.47% atau sebanyak 12.917 titik dari total kebutuhan selama 5 tahun sebanyak 17.116 titik, dimana pada tahun 2016 terpasang sebanyak 846 titik terdiri dari 402 titik dengan sistem LED dan 444 titik sistem Non LED .

Urusan perumahan secara kelembagaan terdapat Dinas Tata Ruang dan Perumahan yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, sebagai informasi jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang sebanyak 367 lokasi dan jumlah rumah sebanyak 118.000 unit dengan angka backlog sebesar 18.000 unit.

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi mendapat Program Pengurangan Kawasan Kumuh melalui SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) pada 3 (tiga) Lokasi yaitu: Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Legok. Selain dari itu terdapat Program Rumah Tidak Layak Huni melalui SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Jambi dimana untuk Kota Jambi mendapat bantuan sebanyak 250 unit rumah tersebar pada 10 Kelurahan di Kota Jambi, dengan nilai bantuan dari Rp. 7.500.000,- sampai Rp. 15.000.000,- dan di tahun 2017 mendapat bantuan sebanyak 232 unit rumah.

Dan untuk Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan Pembangunan Rumah Susun Sewa yang diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah khusus Tenaga Medis yang dibangun pada Lokasi RSUD Abdul Manap Kota Jambi sebanyak 1 (satu) Tower yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) unit type 36, melalui SNVT Penyediaan Perumahan.

Terakhir dapat disampaikan bahwa pada urusan perumahan terdapat juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adapun misi Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan instansi pemerintah dalam bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan dan rekondisi korban bencana.

Strategi yang dilakukan terkait dengan urusan perumahan adalah dengan cara melaksanakan koordinasi perizinan pembangunan gedung (IMB), Izin penggunaan bangunan dan Izin lokasi (Rekomendasi keruangan).

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran didukung dengan :

- a. 1 (satu) unit Mako;
- b. 4 (empat) unit Posyankar yaitu Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru dan Danau Teluk;
- c. 4 (empat) unit Fire Truck kapasitas 10.000 liter;
- d. 5 (lima) unit Fire Truck Kapasitas 5.000 liter;
- e. 1 (satu) unit Fire Truck Kapasitas 4.000 liter;
- f. 3 (tiga) unit Fire Truck Kapasitas 3.000 liter;
- g. 1 (satu) unit Mobil Pompa;
- h. 1 (satu) unit Mobil Rescue;
- i. 1 (satu) unit Gerobak Motor Pemadam;
- j. 1 (satu) unit Mobil Pasukan;
- k. 5 (lima) unit Perahu Karet;
- l. 125 (seratus dua puluh lima) orang Satgas.

Dengan kondisi yang dimiliki pada tahun 2016 BPBD dan Damkar masih memiliki respon time sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang penanggulangan kebakaran yaitu selama 15 menit dari pos terdekat menuju lokasi kebakaran.

4.1.5. URUSAN PENATAAN RUANG

Pelaksanaan urusan Penataan Ruang Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2016 di laksanakan pada dua SKPD, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan. Dimana pelaksanaannya terangkum pada 1 program yang dijabarkan dalam 4 kegiatan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.483.745.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.089.850.013,- atau 84,14% dari total yang di anggarkan pada tahun 2016. Besaran silpa yang mencapai 15% lebih tentunya bukan suatu hal yang baik dalam kacamata perencanaan, kedepan diharapkan kepada Dinas Tata Ruang dan Perumahan untuk lebih jeli dalam menyusun perencanaan kegiatan.

Pada urusan Penataan Ruang sebagaimana di tetapkan dalam RPJMD bahwa target indikator daerah untuk urusan penataan ruang adalah rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 100% setiap tahunnya. Target capaian ini di wujudkan dengan cara tertib pemberian perizinan yang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan dan rencana kawasan strategis. Namun demikian, pada tahun 2016 terdapat 150.550

bangunan ber-IMB di Kota Jambi, dimana 9.500 bangunan diantaranya termasuk dalam kategori melanggar atau pembangunan dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian capaian target kesesuaian ruang pada tahun 2016 adalah sebesar 93,69% atau masih terdapat margin sebesar 6,31% margin bangunan yang harus ditertibkan. Kondisi ini menuntut peningkatan kinerja dan profesionalisme instansi teknis pelaksana fungsi pengawasan dan pengendalian ruang serta pemberian rekomendasi perizinan.

Disamping itu, kondisi ini tentunya harus didukung dengan penyediaan regulasi peraturan zonasi sebagai turunan untuk mengimplementasikan Perda Tata Ruang berupa dokumen rencana untuk menganalisis dan menciptakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas penganggaran guna merealisasikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda tata ruang sehingga dapat menjawab berbagai persoalan perkotaan yang harus segera diselesaikan.

Dalam pelaksanaan operasional terkait tata ruang, saat ini hanya berdasarkan rencana umum RTRW sehingga untuk mengambil keputusan untuk fungsi bangunan yang belum diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2013 sulit dilakukan secara tepat. Sebagai contoh, banyak izin yang dikeluarkan berdasarkan Perda RTRW Kota Jambi Tahun 2000-2010, terutama bangunan gudang yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kota Jambi 2013-2033. Dengan telah rampungnya penyusunan RDTR untuk BWK II, III, V dan VI pada tahun 2016 artinya telah melengkapi penyusunan RDTR Kota Jambi yang telah dilaksanakan dari tahun 2015 dan diharapkan dapat segera disahkan menjadi Perda pada tahun 2017 mendatang sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ruang di Kota Jambi.

4.1.6. URUSAN PERENCANAAN

Urusan wajib bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan, anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp 7.527.887.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.236.576.475,- atau 96,13 %, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 95,84%.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Bappeda Kota Jambi pada Tahun 2016 melaksanakan 8 Program dengan 30 Kegiatan yang antara lain melaksanakan Sistem Perencanaan Daerah (SIMREDA), menyusun Buku Statistik Kota Jambi Tahun 2015, melaksanakan Forum SKPD Musrenbang RKPD Tingkat Kota Jambi tahun 2016 untuk perencanaan 2017, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2017, buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2016, buku KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 dan buku KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran

2016, buku Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) dan Summary LKPJ Walikota Jambi tahun 2015, menyusun laporan pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, melaksanakan koordinasi dengan SKPD dan *stakeholders* lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan sumberdaya manusia di Kota Jambi; menyusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP); memfasilitasi kegiatan DAK, *Sewerage System*, *Waste to Energy*, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta rencana pembangunan TPA *Sanitary Landfill*; memfasilitasi kerjasama Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Telkom dan PT. Mitratel; memfasilitasi usulan SKPD ke Pemerintah Pusat untuk pendanaan pembangunan Kota Jambi; menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA); menyusun Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD); menyusun dokumen Dinamika Pembangunan Kota Jambi; menyusun Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Jambi; menyusun Dokumen Study Kelayakan (FS) Pembangunan Industri Daerah Kota Jambi; menyusun Kajian Potensi PAD Pajak Parkir dan Retribusi Parkir; melaksanakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Sekolah Tingkat Menengah dan mengirim peserta LKTI ke tingkat Propinsi Jambi; menyusun Studi Investasi Daerah, melaksanakan kajian Aksi Mitigasi terhadap Bencana; melaksanakan kajian Efektifitas Sertifikasi Tenaga Pendidik Tingkat SD di Kota Jambi; melaksanakan Kajian Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan UMKM serta Efektifitas Modal Promosi Pemasaran Produk UMKM; melaksanakan Koordinasi Pembangunan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi; serta melaksanakan kegiatan non urusan lainnya seperti peningkatan sarana prasarana kantor; menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja Bappeda; melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi maupun instansi terkait lainnya.

4.1.7. URUSAN PERHUBUNGAN

Selanjutnya, untuk Urusan Perhubungan pada Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi telah dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.2.239.104.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.823.735.261,- atau sebesar 87,54%.

Berkenaan dengan alokasi dana yang dianggarkan pada Kantor Pengelola Parkir Kota Jambi tersebut, telah dilaksanakan program kegiatan untuk peningkatan efektifitas operasional pemungutan retribusi parkir, pembayaran premi asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi juru parkir, penyediaan papan informasi parkir, pembatas kecepatan kendaraan, pemasangan

besi pembatas, pengadaan palang parkir untuk *barrier gate*, melaksanakan razia juru parkir liar, pengawas petugas parkir, serta melaksanakan pengaturan parkir.

4.1.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Melihat Kondisi lingkungan hidup di kota Jambi secara umum sudah sangat memprihatinkan, sehingga sangat mendesak di lakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dulu hanya di pikirkan bagaimana mengelola limbah cair, gas dan padat, artinya pengelolaan di lakukan setelah limbah itu terjadi. Pada paradigma baru, tidak semata berfokus pada pengolahan limbah, tapi upaya untuk menghindari, meminimalisir, dan memitigasi (merehabilitasi) limbah juga menjadi pemikiran utama. Makanya pengelolaan lingkungan lebih di tarik ke ranah hulu mulai dari perencanaan, formulasi kebijakan, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha. Pada setiap siklus usaha di upayakan mereduksi dampak lingkungan opsi pengelolaan lingkungan seperti Kajian lingkungan hidup strategi, instrumen ekonomilingkungan, *polluter must pay principle*, produksi bersih, ISO 14001, dst.

Pada tahap rencana kegiatan maka Amdal,UKL/UPL merupakan instrumen yang harus dipenuhi dengan baik. AMDAL merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan. Tantangan yang di hadapi Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu instansi pemerintah Daerah Kota Jambi antara lain :

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya alam.
2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan.
3. Pencemaran lingkungan (air. Udara dan tanah) yang di akibatkan oleh aktivitas manusia (limbah cair rumah tangga/pabrik).

Salah satu target RPJMD Pemerintah Kota Jambi. Dimana fungsi urusan terkait lingkungan hidup ini di laksanakan pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, yang diakomodir dalam 10 Program dan tersebar pada 31 kegiatan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2016. Dengan alokasi anggaran dana APBD sebesar Rp. 5.559.402.000,- telah terealisasi anggaran sebesar Rp,5.248.619.463,- pada tahun 2016 dengan bobot persentase serapan sebesar 94,40 %.

Target Indikator kinerja Daerah yang pertama pada Tahun 2016 dalam Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dengan terbentuknya 3 kawasan Kampung Iklim, terbentuknya 2 kelompok bank sampah, terbentuknya 30 Sekolah Adiwiyata, terbentuknya 12 sekolah bank sampah, sebanyak 20 Perusahaan yang telah di bina untuk ikut Profer, tersusunya sebanyak 15 buah buku Status Lingkungan hidup Daerah dan Basis Data LH.

Target Indikator kinerja Daerah yang kedua pada Tahun 2016 dengan menurunnya beban pencemaran di Kota Jambi karena Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap 50 Perusahaan penghasil dan pengelola limbah berjalan secara baik dan efektif, sosialisasi berjalan dengan sukses, adanya bantuan sebanyak 50 orang duta sanitasi kota Jambi, kualitas udara selalu di pantau dengan melaksanakan uji emisi pada tempat-tempat tertentu, terlaksannya dengan baik koordinasi antar lintas sektoral dalam penentuan sebanyak 86 titik pantau Adipura yang tersebar di 11 Kecamatan dalam kota Jambi.

Target Indikator Kinerja Daerah yang ke tiga pada tahun 2016 dengan meningkatnya pemberian Pelayanan pengujian kadar limbah padat dan cair dengan melakukan pemantauan pemantauan kualitas sumber air sebanyak 23 titik lokasi dan pengambilan 800 sampel limbah yang di uji kualitasnya.

Target Indikator Kinerja Daerah yang ke empat pada Tahun 2016 dengan meningkatnya Pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan terbukti dengan selesainya seluruh permasalahan atas pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran /perusakan lingkungan hidup sebanyak 25 Pengaduan.

Target Indikator Kinerja Daerah yang kelima pada tahun 2016 sebaiknya terintegrasi dengan rencana kegiatan antar instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, informasi kondisi lingkungan hidup Kota Jambi dan masih tersedianya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang refresentatif seperti terlihat pada tabel ini.

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Lokasi (Kecamatan)	Luas (Ha)
1	RTH Hutan Kota	Kota Baru, Telanaipura, Jambi Timur.	524,00
2	RTH Taman	Kota Jambi (tersebar)	875,90
3	RTH sempadan danau	Telanaipura, Danau Teluk	300,00
4	RTH sempadan sungai	Kota Jambi	325,00
5	RTH Jalau Hijau jalan dan pedestrian	Kota Jambi	93,00
6	RTH Makam	Kota Jambi	140,00
7	RTH Kawasan Perkantoran Pemerintah	Kota Baru dan Telanaipura	27,00
8	RTH Fungsi tertentu (sabuk Hijau)	Kota baru dan Telanaipura	376,50

9	RTH fungsi tertentu (lahan pertanian Perkantoran)	Kota Jambi	956,10
Jumlah			3.617,50

Sumber : DLH Kota Jambi

Ratio RTH terhadap luas wilayah sebesar 9,00%. Pada Tahun 2014 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 ha untuk RTH dilokasi Bagan Pete dari total rencana di bagan pete seluas 94 ha dengan penambahan 7,17 ha totalnya menjadi baru mencapai 41,2 Ha, dimana kondisi ini masih sama pada tahun 2016. Target 9,00% dari luas wilayah yang semestinya sudah mencapai 2.191.63 ha namun baru terpenuhi baru terealisasi sebesar 1224.17 ha atau 6.97% dengan kata lain masih sama seperti tahun sebelumnya. Terkait kondisi ini kepada Instansi terkait harus meningkatkan upaya untuk penambahan luasan RTH di Kota Jambi pada tahun berikutnya.

Penurunan tingkat polusi air pada sungai tembuku dan sungai asam terjadi penurunan menjadi 22 s/d 20 mgl. Pada kenyataan hasil pengujian air sungai tembuku dan sungai asam kondisinya agak semakin membaik dengan tingkat polusi mencapai 24,74 mg/L pada tahun 2015 935 mg/L dan kembali mengalami peningkatan kualitas dengan tingkat pencemaran mencapai 24,74 mg/L pada tahun 2016. Hal ini disebabkan kondisi sanitasi lingkungan di kawasan sempadan sungai yang mulai ada pengelolaan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas PU, DKPP, Dinas Kesehatan, Bappeda, DLH, Distarum, Camat dan Lurah, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kawasan badan air mulai ada, seperti halnya tidak lagi membuang air limbah maupun sampah ke sungai. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian tersendiri pada tahun 2016 partisipasi masyarakat akan lebih meningkat lagi dengan harapan dapat menekan angka pencemaran pada kedua sungai tersebut.

Adapun beberapa prestasi Pemerintah Kota Jambi tahun 2016 antara lain :

1. Penerima penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2016 berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : 828/KEP.GUB/BLHD-5.2/2016 tanggal 09 September 2016.
2. Penerima Anugerah Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.558/Menlhk/Sekjen/Peg.7/7/2016 tanggal 19 Juli 2016.
3. Penetapan sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Jambi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor : 523 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016.

4.1.9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dalam Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Kota Jambi yaitu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Jambi. Latar belakang yang menjadi isu strategis didirikannya SKPD ini adalah masalah kependudukan yang saat ini menjadi isu yang mengglobal atau isu nasional, salah satu isu yang paling aktual adalah masalah tingginya kenaikan jumlah penduduk akibat pertumbuhan yang tidak terkendali demikian juga dengan meningkatnya Urbanisasi ke Kota Jambi. Tingginya pertumbuhan penduduk pada suatu Negara atau wilayah, membawa dampak yang beragam, baik dampak positif maupun masalah yang dapat kita sebut sebagai dampak negatif. Dampak positif dari tingginya pertumbuhan penduduk adalah, munculnya angka potensi sumber daya manusia produktif, yang dapat menjadi motor utama penggerak pembangunan suatu bangsa atau wilayah, tentu saja dengan manajemen pengelolaan kependudukan yang tepat, efektif dan efisien karena tersedianya tenaga kerja. Adapun dampak negatif dari tingginya pertumbuhan penduduk adalah masalah kerawanan sosial yang sistematis, dimulai dari tingginya angka kriminalitas, terbatasnya ketersediaan bahan pangan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya standar kesehatan, anomali konflik dan masalah kerawanan lainnya termasuk kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu diperlukan langkah strategis yang tepat dan jitu dalam menangani masalah kependudukan pada suatu wilayah. Kota Jambi adalah salah satu kota sedang yang menuju kota besar sebagai ibukota propinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi positif paling pesat di Indonesia, saat ini menjadi magnet bagi mobilitas perpindahan penduduk dari luar daerah kedalam Kota Jambi atau lazimnya dikenal dengan sebutan Urbanisasi. Potensi kerawanan sosial akibat pesatnya pertumbuhan pendudukpun menjadi salah satu isu strategis dalam merencanakan rencana strategis Kota Jambi.

Permasalahan dasar atau Isu strategis yang berkaitan dengan masalah dasar di bidang kependudukan di Kota Jambi adalah belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula. Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*Clean governance*)”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good gevernance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*)”. Sasaran dari tujuan ini adalah, tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan menerapkan SOP dalam pelayanan publik. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja daerah untuk urusan kependudukan dan catatan sipil yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam APBD Kota

Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 8.021.363.929 untuk melaksanakan 27 kegiatan dalam 8 program. Realisasi keuangan untuk penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 7.117.022.131 (88,73%) dari total target anggaran TA 2016 terdapat sisa dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 904.341.798,- (11,27%).

Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, telah dilakukan kerjasama dengan pihak kecamatan untuk melakukan rekam data dan up date data penduduk sesuai ketentuan untuk mendapatkan NIK dan KK, dengan menempatkan tenaga khusus untuk pendataan secara digital. Capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016, sesuai jumlah penduduk Kota Jambi 775.427 Jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Dokumen kependudukan	2016
1	KTP/NIK	165.102
2	KK	700.250
3	Akta Kenal Lahir	15.422
4	Akta Kematian	932
5	Jumlah Penduduk	775.427

Peningkatan jumlah penduduk disebabkan urbanisasi dan kematian bayi yang sudah dapat dikendalikan. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun anggaran 2016, hanya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk kedepan antara lain :

1. Ketersediaan Blangko KTP - el.
2. Masih terdapatnya penduduk yang merekam data lebih dari 1 (satu) kali dan terdampak tidak bias diterbitkan KTP bersangkutan.
3. Lambatnya perekaman data terkirim ke data center di Jakarta.
4. Belum optimalnya pelaporan mengenai kelahiran dan kematian oleh RT maupun Kelurahan.

4.1.10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tugas dan tanggung jawab dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi.

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Jambi adalah masih tingginya angka tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, serta masih rendahnya persentase perempuan pada posisi eselon II dan III di lembaga pemerintahan. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender di semua aspek pembangunan”. Sasaran dari tujuan ini adalah terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah, dengan upaya peningkatan peran perempuan di pemerintahan. Dengan adanya strategi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan porsi perempuan dalam jabatan pemerintahan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2016.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja langsung daerah yang dialokasikan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 11.542.052.090 dan terealisasi sebesar Rp. 11.402.337.277 (97,13%).

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kurun waktu 2016 telah ditangani 29 kasus pencabulan, 8 kasus penelantaran, 20 kasus KDRT.
- b. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tingkat Kota Jambi tahun 2016, terdapat 130.572 rumah tangga, 130.570 Kepala keluarga dengan 501.572 jiwa, atau rata-rata jiwa dalam keluarga sebanyak 3,84 jiwa terdiri dari 271.609 jiwa laki-laki dan 282.931 jiwa perempuan.
- c. Dari 133.282 kepala keluarga yang ada di Kota Jambi, digolongkan kedalam 5 tahap keluarga, Pra Sejahtera 2.936, KS tahap I dan Sejahtera 127.634.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.11. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan tugas dan tanggung jawab dari SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi

Adapun isu strategis yang berkaitan dengan masalah pokok di bidang pemberdayaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Jambi adalah masih tingginya angka kelahiran yang tidak terkontrol, implikasi dari fenomena ini adalah masih tingginya jumlah tindak KDRT dan anak, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tantangan tersebut harus ditangani secara efektif dan tepat sasaran dengan menetapkan program yang tepat pula.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja daerah untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.869.861.000 terealisasi sebesar Rp. 4.730.146.187 (97,13%).

Adapun pencapaian dan hasil yang telah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi, sesuai dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Jambi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2016 adalah Pelayanan peserta KB baru dengan total 1.079 akseptor (1,057% dari PPM), pelayanan KB Pria sebanyak 0, kegagalan akseptor IUD sebanyak 6 kasus (1,26% dari peserta KB aktif) dan telah ditangani secara medis. Tidak ada kasus komplikasi alat kontrasepsi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.12. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial yang merupakan urusan wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Jambi. Pada tahun 2016, total anggaran belanja langsung untuk urusan sosial adalah sebesar Rp. 4.686.866.000,- dengan realisasi

keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung urusan sosial tersebut adalah sebesar Rp. 4.492.694.538,- atau sebesar 99,49 % untuk melaksanakan 7 Program dan 35 kegiatan.

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan sosial pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja dengan rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani per tahun sebesar 36% dari total target selama 5 tahun sebesar 7.543 PMKS. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 70,00 % atau 10.317 PMKS. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan sosial.

4.1.13. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Urusan ketenagakerjaan merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi. Pada tahun 2016, total anggaran belanja langsung untuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 untuk urusan ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 1.196.733.000,- untuk melaksanakan 1 (satu) Program dan 5 (lima) kegiatan. Realisasi keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung urusan sosial tersebut adalah sebesar Rp. 1.099.992.900,- (91.92%).

Sesuai dengan target indikator kinerja urusan ketenagakerjaan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018, dengan sasaran terciptanya lapangan pekerjaan, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja jumlah angkatan jumlah kerja terdaftar yang terserap sebesar 20% dari total target selama 5 tahun sebesar 5.903 angkatan kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 37.90 % atau 2.237 angkatan kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Sasaran kedua adalah tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing, pada tahun 2016 ditargetkan indikator kinerja Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM sebesar 3% dari total target selama 5 tahun sebesar 16.202 tenaga kerja. Realisasi yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebesar 10.28% atau 1.665 tenaga kerja. Angka tersebut menggambarkan bahwa, pada tahun 2016 realisasi indikator kinerja yang ditargetkan pada RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Adapun hasil dan prestasi yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 untuk kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja AK-1 dari Transpacific.
2. Memperoleh Penghargaan Produktivitas (SIDDHAKARYA) dari Bapak Gubernur Jambi sebagai Pembina Pemenang Terbaik II (kedua) untuk Penilaian Kualitas dan Produktivitas Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2016 Kategori : Usaha Menengah.
3. Memperoleh Penghargaan sebagai Pembina Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan di Kota Jambi Tahun 2016 dari Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Bapak Walikota Jambi
4. Penghargaan dari Bapak Walikota Jambi kepada Perusahaan yang telah melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan *Zero Accident* yaitu:
 - PT. Indofood CBP Sukses Makmur Cab.Jambi
 - PT. Pertamina UEP Jambi
 - PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office I
 - PT. Transportasi Gas Indonesia GTM
 - PT. Djambi Waras
 - PT. Eramas Persada Energy Jambi
 - PT. Bumi Jambi
 - PT. Energasindo Heksa Karya

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.14. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah merupakan urusan wajib yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam RPJMD 2013-2018 pada misi 2 tentang arah kebijakan yang berisikan untuk mendorong dan meningkatkan tumbuh kembangnya wirausaha baru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan Koperasi dan UMKM.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah saat ini lebih mengarah pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator

yang tujuannya adalah mencapai kemandirian, kematangan dan kedewasaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Pada tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.691.000.000,- dengan realisasi Rp. 4.421.010.926,- atau 94,23%. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun ini antara lain pembinaan, pelatihan, penyuluhan, serta pengawasan terhadap Koperasi dan pemberian bantuan pada pelaku UMKM juga mempromosikan berbagai macam hasil produk-produk UMKM ke luar daerah melalui pameran-pameran.

Target yang ditetapkan untuk koperasi aktif dan UMKM mandiri masing-masing 5 unit sesuai dengan target RPJMD Kota Jambi, sampai dengan tahun 2016 jumlah koperasi aktif sebanyak 208 unit dan UMKM mandiri 155 unit.

Prestasi yang telah dicapai Kota Jambi tahun 2016 adalah :

1. Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM dari Presiden RI yang diserahkan pada Hari Koperasi ke 69 di Provinsi Jambi.
2. Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional yang diberikan pada KOPKAR PTPN VI untuk jenis koperasi jasa oleh Menteri Koperasi dan UKM RI.

4.1.15. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor dalam pengembangan usaha di Kota Jambi.

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Penanaman Modal pada tahun 2016 Belanja Langsung sebesar Rp. 4.022.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.746.638.633,- atau 93,15% dan realisasi fisik sebesar 98,82%. Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan Urusan Penanaman Modal dijabarkan kedalam 9 program dengan 33 kegiatan. Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah:

1. Realisasi Investasi PMDN melalui Izin Prinsip Penanaman Modal sampai dengan bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp. 2.104.401.841.760,-
2. Penerbitan 11.265 izin baru dan sebanyak 14.543 izin yang diregistrasi (Daftar Ulang).

3. Melaksanakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode survey kemasyarakatan melalui 9 unsur pelayanan, pada tahun 2016 dapat dikonversi dengan angka IKM 81,08% dengan mutu pelayanan pada kategori *BAIK*.
4. Selama tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Jambi telah mengikuti Promosi Investasi sebanyak 3 kali. Promosi ini bertujuan mengenalkan kepada calon investor dalam dan luar negeri tentang potensi-potensi investasi yang ada di Kota Jambi dengan harapan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi.
5. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan multi player effect positif bagi perekonomian Daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Penanaman Modal adalah peningkatan realisasi investasi dan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun pencapaian realisasi investasi Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.104.401.841.760,- Untuk pencapaian IKM pada tahun 2016 ditargetkan dengan status “BAIK”, dimana IKM pada tahun 2016 menghasilkan angka 81,08% yang berarti “BAIK”. Dengan demikian target IKM pada tahun 2016 tercapai dengan angka yang memuaskan.

Adapun keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016, BPMPPT telah mengembangkan sistem Pelayanan Perizinan Online secara bertahap dengan bentuk online melalui website yang sudah diluncurkan pada tanggal 27 Desember 2016 oleh Walikota Jambi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Penanaman Modal adalah BPMPPT belum mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal yang berdampak pada Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum bisa diterapkan secara optimal. Masih belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang penanaman modal, khususnya mengenai kewajiban bagi setiap investor untuk memiliki izin prinsip penanaman modal sebelum memulai kegiatan investasi ataupun mengembangkan investasi yang sudah dilaksanakan, investor belum mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

4.1.16. URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditujukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan cara pembinaan sanggar-

sanggar seni dan pelestarian cagar budaya di Kota Jambi. Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya serta pelaksanaannya dan mengikuti even-even seni budaya didalam maupun diluar daerah .

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Kebudayaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.180.585.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 999.534.150,- atau 84,66%, dan realisasi fisik sebesar 89,48%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana terutama kegiatan pementasan diluar daerah. Untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dijabarkan kedalam satu program dengan 2 Kegiatan. Adapun pencapaian beberapa kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Bulan Promosi Pemerintah Kota Jambi di TMII Jakarta
- b. Lomba Lagu Mars dan Hymne Kota Jambi
- c. Apresiasi Seni dan Budaya
- d. Rahap Makam
- e. Festival DanauTeluk
- f. Festival Batang Hari
- g. Pemugaran Makam Prabu Suta Wijaya

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Kebudayaan adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU jumlah sarana dan prasarana seni dan budaya tahun 2016 ditargetkan menjadi 40% dari kondisi awal sebesar 10% (tahun 2013). Urusan kebudayaan pada tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan target IKU tersebut, diantaranya adalah Pemugaran Makam Suta Wijoyo yang berguna untuk pengetahuan sejarah dan kebudayaan bagi para pelajar dan masyarakat. Selanjutnya untuk peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya belum dilakukan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana yang tersedia, dengan demikian target IKU pada tahun 2016 tersebut belum tercapai.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Kebudayaan adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana budaya. Terkait hal tersebut akan terus diusahakan untuk mengajukan anggaran ke pemerintah pusat dan juga ke Pemerintah Provinsi Jambi.

4.1.17. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Urusan Pemuda dan Olahraga merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk meningkatkan peran Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkreaitifitas, pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda, peningkatan sarana dan

prasarana olahraga dan pelaksanaan event-event pertandingan serta pencarian atlet-atlet berprestasi dan pembinaannya. Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.469.956.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 82,84% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pencapaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 82,84% dikarenakan penyerapan yang tidak maksimal pada Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga. Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan urusan Pemuda dan Olahraga dijabarkan ke dalam 1 program dengan 5 kegiatan. Adapun pencapaian beberapa prestasi pada tahun 2016 diantaranya adalah Juara II Napak Tilas di Merangin Tahun 2016, Pengiriman BPAP ke Tingkat Nasional 5 orang ke Kalimantan, Pengiriman PASKIBRAKA ke Tingkat Provinsi 10 orang, Juara Umum PORPROV Jambi di Batanghari dan Juara II Pekan Paralimpic Tahun 2016 Tingkat Provinsi di Jambi

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013 – 2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh urusan Pemuda dan Olahraga adalah peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga, seni dan budaya serta terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan meningkat menjadi 30% dari target tahun 2015 sebesar 20%. Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU tersebut, diantaranya adalah pengadaan dayung dragon boat race serta pelaksanaan tinju amatir Piala Wakil Presiden dan Piala Walikota Jambi. Walau telah melakukan berbagai upaya, namun IKU tersebut pada tahun 2016 belum tercapai terutama dari sisi peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemuda dan Olahraga adalah keterbatasan dana yang tersedia, sehingga menyebabkan minimnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana olahraga.

Prestasi Yang Pernah di raih tahun 2016 :

1. Juara II Napak Tilas di Merangin Tahun 2016.
2. Pengiriman BPAP ke Tingkat Nasional 5 orang ke Kalimantan Tahun 2016.
3. Pengiriman PASKIBRAKA ke Tingkat Provinsi 10 orang Tahun 2016.
4. Juara Umum PORPROV Jambi di Batanghari Tahun 2016
5. Juara II Pekan Paralimpic Tahun 2016 Tingkat Provinsi di Jambi.

4.1.18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “mewujudkan masyarakat kota yang berakhlak, berbudaya dan berdaya saing” yang merupakan Misi yang ke-3

dari RPJMD Kota Jambi guna mendukung visi Kota Jambi yaitu "mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Urusan ini pada tahun 2016 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan misi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2016 memiliki 2 (dua) program urusan yang terdiri atas 7 kegiatan, didukung dengan 2 (dua) program urusan dari Satuan Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 5 kegiatan.

Dana yang dialokasikan untuk melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2016 berjumlah Rp. 2.835.645.850,- untuk SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi keuangan sebesar 94,46% atau Rp. 2.678.455.106,- dan realisasi fisik sebesar 100%, sedangkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebesar jumlah anggarannya sebanyak Rp. 8.048.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 85,98 % atau Rp. 6.919.642.504,- dan realisasi fisik sebesar 100 %. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak ditemui permasalahan yang signifikan.

Didalam melaksanakan 4 (empat) program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri ini, kedua SKPD mengacu kepada pemenuhan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD pada misi ke - 3 (tiga) yaitu, persentase penyelesaian permasalahan keagamaan. Pada tahun 2016 target penyelesaian konflik adalah 100%, yang berarti semua konflik yang terjadi pada tahun 2016, dapat diselesaikan dengan baik. Untuk mencapai target tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan dan program, diantaranya program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan seterusnya. Selain itu, dari masing - masing SKPD juga memiliki Indikator Kinerja Kunci yang mendukung tercapainya ketertiban kerukunan beragama, yang pencapaiannya juga difasilitasi didalam program dan kegiatan di kedua SKPD tersebut.

4.1.19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH

Urusan Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian di Sekretariat Kota Jambi dan 11 (sebelas) kecamatan di Kota Jambi.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian sumber-sumber

pendapatan daerah yang meliputi Pendataan, Penetapan, Penagihan, Perencanaan dan Pelaporan, Pengendalian dan Penyuluhan, Ketatausahaan/Kesekretariatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada tahun 2016 Dispenda mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.634.040.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.528.925.213,- atau 83,3% dan realisasi fisik sebesar 95,30%. Pada tahun 2016 Dispenda melaksanakan 6 program rutin (23 kegiatan) dan 1 program urusan (7 kegiatan). Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah:

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan/Penerimaan Daerah

- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat.
- Kebijakan insentif.
- Updating basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan.
- Melakukan evaluasi dan pengkajian perkembangan Pajak Daerah guna mendapatkan data potensi dari obyek Pajak Daerah.
- Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan melalui survey lapangan terhadap perkembangan/perubahan data objek pajak, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan wajib pajak seperti tutup usaha, perubahan tempat, ukuran dan lain sebagainya.
- Melakukan pengkajian Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang-undang yang berlaku.

b. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dispenda Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar Rp. 187.336.000.000,-. Realisasi penerimaan yang dapat dicapai adalah sebesar Rp. 160.582.009.507,89 atau 85,72%. Dengan demikian pada tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp. 26.753.990.492.11,- atau sebesar 14,28% .

Sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Jambi Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.179.644.803,- atau 60,60%.

Permasalahan/kendala yang dihadapi Dispenda Kota Jambi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan uang pajak.
2. Kurangnya SDM berkualitas yang memahami masalah perpajakan.
3. Penegakan hukum (*Low Inforcement*) yang lemah.
4. Data Base Pajak belum berbasis komputerisasi.
5. Kurangnya Intensitas koordinasi antar Instansi terkait.

6. Legalitas usaha yang menjadi dasar pengukuhan wajib pajak.
7. Sarana dan prasarana belum optimal.
8. Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) masih rendah.
9. Penerapan sanksi bagi wajib pajak (WP) yang nakal belum tegas.
10. Sistem perpajakan daerah masih bersifat manual (belum computerized)

Upaya yang dilaksanakan Dispenda Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan mengikutsertakan pegawai Dinas Pendapatan Kota Jambi untuk mengikuti Diklat / Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
- 2) Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pajak Daerah kepada WPWR agar dapat ditingkatkan secara optimal.
- 3) Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dengan mengajukan usulan penambahan anggaran kepada TAPD dalam rangka menunjang kegiatan operasional Dinas.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) melalui kegiatan sosialisasi/ penyuluhan.
- 5) Peninjauan kembali/merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi fiskal keuangan maupun kondisi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- 6) Melaksanakan *system computerized* pajak daerah.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.

Pada tahun 2016 DPKAD mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.704.684.203,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.180.038.969,- atau 92,2% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2016 DPKAD melaksanakan 6 program rutin (21 kegiatan) dan 1 program urusan (19 kegiatan). Pada tahun 2016 target kontribusi yang diberikan dari pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah sebesar Rp. 316.463.773.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 287.551.400.033,49,- dengan persentase sebesar 90,86%.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh DPKAD Kota Jambi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian IKU tersebut pada tahun 2016 menunggu hasil audit oleh BPK, sedangkan pada tahun 2015 pencapaian IKU belum menghasilkan WTP. Progres capaian yang diperoleh sampai saat ini

adalah 75% dengan upaya yang telah dilakukan berupa penatausahaan aset dengan menggunakan sistem/aplikasi yang terintegritas dengan sistem/aplikasi keuangan dan juga menginventarisir selisih seluruh data barang milik daerah dengan neraca secara komprehensif yang melibatkan seluruh elemen dan unsur terkait.

Untuk mencapai misi ke-4 (empat) dari RPJMD Kota Jambi, didalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih (*Clean Government*), maka pemerintah Kota Jambi melalui BKD sebagai pelaksana kegiatan, telah membuat Indikator Kinerja Utama didalam pencapaian misi tersebut, yaitu Rasio jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian. Target RPMJD untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 75%, dengan jumlah pegawai negeri sipil 6.886 orang, dimana 55,98% didominasi dengan tamatan S1, diikuti 23,17% tamatan SD-SMA, tamatan D1-D3 sebesar 15,03% dan hanya 0.11% S3 serta 4,69% S2, maka pemerintah kota Jambi didalam mencapai target indikator kinerja utama tersebut, pada tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5.846.500.000,- untuk melaksanakan program pendidikan kedinasan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program pembinaan dan pengembangan aparatur. Realisasi keuangan sebesar 68.55% (Rp. 4.007.714.977) dan 91.86% realisasi fisik.

Dengan program-program yang telah dilaksanakan, maka pencapaian indikator kinerja utama didalam penempatan aparatur sesuai dengan bidang pendidikan, dan keahlian sesuai dengan IKU RPJMD adalah sebesar 93.32% telah melampaui dari target yang telah ditentukan oleh RPMJD yaitu 75%. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Diklat Propinsi untuk mengirim peserta diklat struktural (PIM 3 dan PIM 4) dan mempersiapkan kontribusi sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Propinsi Jambi dan mengirim peserta diklat PIM 2 sesuai yang telah di jadwalkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2016 di Inspektorat Kota Jambi terdapat 8 (delapan) program dan 29 kegiatan, diantaranya program peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.744.700.000,- dan penyerapan dana sebesar 88.73% atau sebesar Rp. 3.322.525.295,- dan realisasi fisik sebesar 100%. Permasalahan yang ditemui dilapangan yang dapat menghambat pencapaian target WTP, diantaranya masih bermasalahnya penataan asset di beberapa SKPD di Kota Jambi.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Urusan Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, khususnya pemerintah umum dan perangkat daerah, Sekretariat DPRD, pada tahun 2016 ini melaksanakan 8 (delapan) program, dua program penunjang pelayanan administrasi DPRD dan 6 (enam) program rutin lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun

2016 sebesar Rp. 22.371.462.000 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 18.146.994.116 (81,12%) dan realisasi fisik sebesar 92,9% Adapun program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan meningkatkan kapasitas aparatur sekretariat dan anggota DPRD dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD yang bertujuan terselenggaranya penerimaan tamu DPRD dan terwujudnya komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara lain. Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Dewan hanya pada kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja untuk tahun 2016 ini tidak dapat dilaksanakan karena belum jelasnya untuk peraturan pelaksanaan kegiatan reses perorangan

Didalam pelaksanaan urusan Otonomi daerah ini, Pemerintah Kota Jambi melalui kecamatan-kecamatan melaksanakan program pemberdayaan kecamatan dengan kegiatan Bangun Kecamatan Secara Intensif dan Terpadu dengan Berazaskan Swadaya, program ini bertujuan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kota Jambi melalui bantuan pemberian bahan material/bangunan pada masyarakat dengan menitik beratkan pada semangat kegotong royongan masyarakat. kegiatan koordinasi pengelola kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan dan kegiatan pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2016, terdapat beberapa prestasi tingkat lokal dan nasional yang telah di raih oleh kecamatan-kecamatan, diantaranya Juara I Hatinya PKK Tingkat Nasional, Juara Harapan Kader BKB Tingkat Nasional, Lomba Kelompok BKB Tingkat Provinsi, Juara I Lomba BBGRM Tingkat Provinsi, Juara I BKL Tingkat Provinsi, Juara I Lomba UKS Tingkat Provinsi, Lomba Juara I Lomba Pemanfaatan Toga Tingkat Provinsi dan Lomba Posyandu Juara II Tingkat Provinsi.

4.1.20. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah kota jambi yang di fokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan konsumsi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Dalam menyelenggarakan urusan ketahanan pangan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.397.521.000,- yang dijabarkan pada 1 program dan 9 kegiatan. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.145.334.630,- atau 94,27% dan realisasi fisik kegiatan 100%.

Upaya yang telah dilaksanakan BKPP pada tahun 2016 antara lain :

1. Terlaksananya Gerakan makan bergizi berimbang, pengujian sampel produk pangan, pengadaan alat labor uji sampel prima 3 dan sosialisasi keamanan pangan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
2. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan dan pembentukan POKJA untuk penganeekaragaman konsumsi pangan, yang dikarenakan masih rendahnya konsumsi pangan sumber karbohidrat selain beras, serta terlaksananya sosialisasi keamanan pangan.
3. Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan di 12 (dua belas) Kelurahan dalam Kota Jambi.
4. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 15.000 Kg untuk lokasi pasca bencana alam dan keadaan darurat.
5. Terlaksananya penilaian kemampuan kelas kelompok tani, Pelatihan petani di BPP, terlaksananya rembug KTNA dan terlaksananya peringatan HKP/PEDA, serta penyuluh dan pendamping bagi pertanian/perkebunan.

Prestasi yang diperoleh pada tahun 2016 adalah Juara I Kategori Cita rasa untuk B2SA Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional Tahun 2016, Juara I Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi serta mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional untuk kategori pelaku ketahanan pangan atas nama Abriyanto Kecamatan Pelayangan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, dan Juara II Apresiasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Jambi untuk kategori Pengolahan Pangan atas nama Kelompok Amanah.

4.1.21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi melalui visi dan misi Walikota Jambi, telah menetapkan misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dalam Bingkai Kearifan Lokal”. Melalui misi tersebut, ditetapkan tujuan “Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearifan lokal”. Sasaran dari tujuan ini adalah, terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan Kota Jambi. Adapun strategi yang diterapkan untuk mewujudkan misi ini adalah dengan upaya peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keseluruhan langkah strategis ini dicapai untuk mewujudkan Kota Jambi Bangkit Tahun 2018.

Pada tahun 2016, total anggaran belanja langsung untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi dalam APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 9.305.943.000,- untuk melaksanakan 8 (Delapan) Program dan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan.

Realisasi keuangan yang dapat direalisasikan dari belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi adalah sebesar Rp. 9.113.130.095,- (97,93%).

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.22. URUSAN KEARSIPAN

Urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab SKPD Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi.

Kearsipan dan dokumentasi merupakan salah satu sasaran strategis pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang kearsipan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013 -2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi yang Berahklak, Berbudaya dan Berdaya Saing”. Dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Alokasi anggaran belanja langsung yang menjadi urusan kearsipan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2016 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp. 268.976.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 245.130.000 (91,13 %)

Dialokasikan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan di bidang Kearsipan dan Dokumentasi.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kearsipan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi pada tahun anggaran 2016.

4.1.23. URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Urusan Informasi dan Komunikasi diselenggarakan oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Jambi. Pada tahun 2016, dana yang dialokasikan untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan

bersih (clean governance), sesuai dengan misi ke-4 RPJMD Kota Jambi adalah sebesar Rp. 4.412.432.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.081.547.820,- atau 92,50% yang dilaksanakan melalui 1 program dan 2 kegiatan di Bagian Humas Setda dan Rp. 1.781.735.000,- untuk 2 program 3 kegiatan di KPDE Kota Jambi. Dari dana yang tersedia untuk penyelenggaraan Urusan Informasi dan Komunikasi terealisasi sebesar 82,21% dengan realisasi fisik mencapai 87,49% yang dilaksanakan oleh Bagian Humas Setda Kota Jambi dan untuk KPDE Kota Jambi terealisasi sebesar 79,85 % dengan realisasi fisik sejumlah 89,75 %.

Guna mewujudkan misi Pemerintahan yang Profesional dan Bersih, pemerintah kota Jambi melakukan peningkatan jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi, melaksanakan diseminasi informasi yang efektif dan pengelolaan data secara elektronik untuk menjadikan Jambi sebagai Kota Pintar (Smart City).

Dalam penyelenggaraan urusan Informasi dan Komunikasi masih terdapat kendala yaitu terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi serta alokasi anggaran yang terbatas untuk urusan ini, karena distribusi belanja langsung lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

4.1.24. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan perpustakaan merupakan urusan wajib yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari SKPD Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi.

Pendidikan dan dunia perpustakaan merupakan sasaran strategis Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun rencana pembangunan bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018, yaitu dalam rangka misi “Mewujudkan Masyarakat Kota Jambi yang Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata”. Strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan mutu dan akses pendidikan, yaitu dengan arah kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk urusan perpustakaan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi untuk tahun anggaran 2016 yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi adalah sebesar Rp. 1.111.770.100,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 935.329.275 atau 84,13 % untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan di bidang Perpustakaan.

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan perpustakaan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi pada tahun anggaran 2016 hanya ada kelebihan anggaran di bidang Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca yang dialokasikan ke Program lain.

4.2. URUSAN PILIHAN

4.2.1. URUSAN PERTANIAN

Dalam rangka mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa selaras dengan Misi Kota Jambi dalam meningkatkan perekonomian kota berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah, sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura berupaya untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan petani yang ada di Kota Jambi dengan berbagai program dan kegiatan baik dari APBD II, APBD I dan APBN baik berupa bantuan benih, pupuk, jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, saprodi lainnya.

Pada tahun 2016, alokasi dana bidang tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp.4.041.926.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.920.511.196,-. Upaya yang dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain :

1. Kegiatan Tanaman Pangan khususnya komoditi padi dan palawija pada tahun 2016 adalah pengembangan padi sawah dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani yakni benih padi sawah sebanyak 14.500 kg untuk lahan sawah seluas 725 Ha. Disamping itu juga dibantu sarana produksi pertanian (saprodi) bagi petani penangkar padi sawah berupa benih, pupuk dan pestisida untuk lahan sawah seluas 6 Ha. Target tanam padi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk Kota Jambi sebesar 1.700 Ha hanya terpenuhi 944 Ha (55,53%), dari luas tanam tersebut yang bisa dipanen hanya seluas 395 Ha, kondisi tersebut disebabkan oleh kemarau dan kabut asap serta selebihnya mengalami puso sebesar 569 Ha. Disamping bantuan yang bersumber dari APBD Kota Jambi ada juga bantuan dari APBD Provinsi Jambi berupa bantuan benih padi sawah untuk kawasan pangan terpadu seluas 250 Ha dan pengembangan jagung hibrida seluas 10 Ha, namun bantuan ini juga mengalami kondisi kekeringan dan puso.
2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian mendukung Tanaman Pangan khususnya komoditi padi berupa bantuan baki semai sebanyak 810 unit yang merupakan teknologi tepat guna untuk luas lahan 10 Ha/musim tanam. Selanjutnya untuk menghindari kehilangan hasil, akibat burung pemakan padi saat padi telah berisi, diberi bantuan jaring padi sebanyak 500 gulung untuk luas lahan sekitar 10 Ha/musin tanam. Melalui dana APBN diberi bantuan kepada kelompok tani untuk kegiatan Pengembangan optimalisasi lahan sawah seluas 200 Ha dan Pengembangan jaringan irigasi seluas 100 Ha, yakni untuk mendukung upaya khusus

peningkatan produksi padi, jagung dan kedele. Disamping itu, juga diberikan bantuan alat dan mesin pertanian berupa Handtraktor 10 unit, pompa air 3 unit, minitraktor 1 unit dan bangunan serta penggilingan padi 1 unit.

3. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mendukung Tanaman Pangan berupa bantuan kendaraan roda 3 dan perlengkapan sebanyak 4 unit yang dimanfaatkan untuk alat angkut saprodi dan pemasaran produk pertanian dan pemasaran produksi pertanian. Dengan cara pemasaran secara langsung dari petani ke konsumen dapat memutus mata rantai pemasaran sekitar 20% sehingga keuntungan petani menjadi meningkat, selanjutnya bantuan alat penggilinging/juicer sebanyak 2 unit untuk pengolahan hasil pertanian
4. Kegiatan Hortikultura Aneka Tanaman pada optimalisasi pemanfaatan pekarangan diberikan bantuan berupa bibit dalam polybag yang diserahkan pada P2WKSS, HATINYA PKK, PHBS dan Kampung Bantar, yakni berupa tanaman cabe sebanyak 3.170 polybag, tanaman terong sebanyak 1.450 polybag, tanaman kembang kol 1.000 polybag serta toga 2.100 polybag. Disamping itu juga, kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura diserahkan bantuan benih sayuran buah sebanyak 650 bungkus dan benih seeding net 1 unit dan tanaman florikultura (hias) juga dikembangkan tanaman anggrek 350 pot. Pada tahun 2016 ini melalui dana APBD kegiatan Hortikultura dan Aneka Tanaman ada pengembangan komoditi cabe seluas 14 Ha. Jenis bantuan yang diberikan berupa bibit cabe dengan jenis Castillo F1 dan TM 999 dan untuk mendukung kegiatan ini diberi juga Sarana Produksi berupa Pupuk Tricokhompos, Pupuk NPK, Mulsa dan Agens Hayati. Disamping pengembangan cabe melalui dana APBD juga dibantu tanaman anggrek dan melati seluas 8.000 M2. Pada tahun 2016 ini dikarenakan kemarau yang panjang dan kabut asap, sehingga untuk capaian luas tanan, panen, produktifitas dan produksi tidak dapat tercapai.
5. Kegiatan Pengembangan bibit Unggul pertanian/perkebunan pada tahun 2016 adalah penyediaan calon induk dan perbanyak bibit/benih hortikultura yang difokuskan pada perbanyak penyediaan bibit tersebut pada awalnya dapat dilaksanakan 100% dari target yang telah ditentukan, namun akibat dari kemarau pada bulan Agustus-November 2016, maka bibit yang tersisa mengalami kematian sekitar 50% yang disebabkan oleh kekeringan.

Untuk pengembangan calon pohon induk yang telah mengalami kenaikan, dimana calon pohon induk buah-buahan yang diadakan pada tahun 2016 diantaranya tanaman jeruk 100 batang (BPMT), durian 50 batang, alpukat 20 batang, sirsak ratu 50 batang, mangga 10 batang, manggis 5 batang dan tanaman koleksi jeruk keprok siam 100 batang, keprok pontianak 100 batang yang kesemuanya telah ditanam pada lahan UPTD Balai Benih Hortikultura Mayang.

Bidang Peternakan

Pembangunan Pertanian dibidang Peternakan bertujuan untuk Peningkatan produksi mutu produk dan diversifikasi sub sektor peternakan sehingga terpenuhi pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

Pada tahun 2016 bidang Peternakan dan UPTD Rumah Potong Hewan mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.597.767.500,- yang terealisasi didalam empat kegiatan yaitu : a). *Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan*, b). *Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan*, c). *Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Peternakan dan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produk Peternakan*, d). *Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Pemotongan Hewan*.

Dari Alokasi anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 1.550.821.830,- (97,06%) sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Dari pencapaian ini dapat dilihat bahwa program yang dilaksanakan di Bidang Peternakan dan UPTD RPH telah mencapai target.

Pencapaian yang telah dilakukan oleh Bidang Peternakan di tahun 2016 ini antara lain adalah Pelayanan kesehatan hewan dari target 350.000 ekor telah terealisasi sebanyak 100%, pemeriksaan sampel Pangan Asal Hewan (PAH) dari target 100 sampel terealisasi sebanyak 100 sampel, dapat dikendalikannya penyakit zoonosis (penyakit hewan menular ke manusia) ditandai dengan berkurangnya kasus penyakit rabies dari 19 kasus positif (tahun 2015) menjadi tidak ada kasus positif (tahun 2016) dan tidak terjadinya kasus Avian Influenza (AI). Peningkatan populasi ternak sapi sebanyak 73 ekor dari hasil kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Tahun 2015. Selain itu pelaksanaan kegiatan operasi pasar daging sapi di Kota Jambi menjelang hari raya Idul Fitri telah membantu masyarakat Kota Jambi dalam mendapatkan daging sapi yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dengan harga yang terjangkau dan kegiatan operasi pasar daging sapi ini juga mempengaruhi tidak terjadinya lonjakan harga daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri.

4.2.2. URUSAN KEHUTANAN

Pembangunan Urusan Kehutanan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan ratio Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 % secara bertahap, mengembangkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan Kehutanan di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi. Pada tahun 2016 pada Bidang Kehutanan memperoleh alokasi anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 1,906,355,000,- dengan realisasi sebesar Rp.1,755,522,000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,57 %.

Berkenaan dengan alokasi anggaran tersebut, telah dilaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengembangan Penanaman dan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota
Alokasi Anggaran Rp. 1.382.780.000,- dengan realisasi fisik 99,12 %. Dana yang digunakan untuk menambah sarana prasarana di Hutan Kota sebesar 3 % yaitu dari 71 % menjadi 74%.
- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
Alokasi Anggaran Rp. 72.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dana yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan peredaran hasil hutan pada 29 industri hasil hutan.
- 3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH Hutan Kota
Alokasi anggaran Rp. 451.575.000,- dengan realisasi fisik 96,58%, dana tersebut digunakan untuk melaksanakan pengaman hutan kota, patrol peredaran hasil hutan, patrol kebakaran hutan dan lahan dan tersedianya bahntuan bahan pagar lingkungan pada P2WKSS, PHBS.

Rasio RTH terhadap luas wilayah sesuai UU No. 26 Tahun 2007 adalah 30%, dimana pada tahun 2015 telah dilakukan pengadaan lahan sebanyak 7,17 Ha dari total rencana 94 Ha dilokasi Kel. Bagan Pete, yang terealisasi baru mencapai 41,2 Ha. Untuk tahun 2016 target 9,00% dari luas wilayah semestinya sudah mencapai 2191,63 Ha namun baru terealisasi sebesar 1224.17 Ha atau 6.97%.

Untuk pengembangan dan pengelolaan hutan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : penganekaragaman hayati dengan menanam beberapa jenis tanaman, sampai tahun 2015 telah ada 222 jenis tanaman, pengendalian peredaran hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan sebesar 87% pada 25 industri, meningkatkan penghijauan lingkungan perkotaan sebesar 3% dan mensukseskan gerakan penanaman 1 milyar pohon.

Disamping menyelenggarakan mengembangkan, mengelola, meningkatkan kualitas dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kehutanan, Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Jambi juga mempunyai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan hutan. Pada tahun 2016 realisasi PAD dari pengelolaan hutan adalah sebesar Rp. 45.475.000,- atau sebesar 45,48 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.-. Target PAD dalam pengelolaan hutan ini dihasilkan pada retibusi masuk hutan kota Muhammad Sabki.

4.2.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak dilaksanakan, karena Kota Jambi tidak memiliki daerah pertambangan dan SDA lainnya. Namun Pemerintah Kota Jambi tetap melakukan

kebijakan pusat yang terkait dengan urusan energi yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Jambi.

Pada tahun 2016 Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 102.098.000,- untuk kegiatan Pengendalian Produksi dan Distribusi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melaksanakan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di Kota Jambi. Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, Bagian Perekonomian Setda Kota Jambi melaksanakan koordinasi antar Dinas/Instansi Konsultan, PT. Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI tentang Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Kota Jambi, membentuk Tim Pendukung Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg di Kota Jambi dan melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap pendistribusian Paket LPG 3 kg pada 11 Kecamatan di 62 Kelurahan dalam Kota Jambi.

4.2.4. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporabudpar) Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan peran pariwisata yang berbasis potensi daerah serta memperhatikan kearifan lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penyelenggaraan event dan promosi pariwisata didalam dan luar daerah serta mengikuti event pariwisata tingkat nasional/internasional.

Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2016 sebesar Rp. 816.357.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 658.432.500,- atau 80,65%, dan realisasi fisik sebesar 82,00%. Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan ada beberapa Event keluar daerah yang tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2016, untuk menyelenggarakan Urusan Pariwisata dijabarkan kedalam Program Pembinaan, Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Daerah. Adapun pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2016 diantaranya adalah terselenggaranya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan melalui Pelaksanaan Lomba Perahu Angsa, Haul Tuanku Keramat Tambak dan Haul Pangeran Wiro Kusumo serta Pemilihan Bujang Gadis.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Pariwisata adalah terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Pencapaian IKU pada tahun 2016 ditargetkan 2 kali terselenggaranya event berskala nasional/internasional. Urusan Pariwisata pada tahun 2016 telah melakukan berbagai

upaya untuk mencapai target IKU tersebut, dan terlaksana 2 kali menyelenggarakan event berskala nasional/internasional, yaitu pelaksanaan Haul Pangeran Wiro Kusumo (Kesultanan Jambi) pada bulan Januari 2016 dan Haul Tuanku Keramat Tambak (Habib Husain Bin Ahmad Baragbah) pada bulan Februari 2016 di Seberang Kota Jambi yang dihadiri para peziarah dari berbagai daerah dan manca negara. Dengan demikian, dari 2 event berskala nasional/internasional yang ditargetkan telah terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata adalah keterbatasan dana dan kurangnya inovasi untuk pengembangan destinasi wisata di Kota Jambi.

4.2.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada tahun 2016 bidang perikanan mendapatkan alokasi Anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 466.300.000,- dan dari APBD II sebesar Rp. 1.636.020.000,- sehingga total anggaran pada tahun 2016 untuk bidang perikanan adalah sebesar Rp. 2.102.320.000,- yang terealisasi didalam empat kegiatan yaitu ;

- a. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidayaan ikan, dimana kegiatan ini dalam rangka mendukung produksi perikanan budidaya yaitu bantuan paket Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 20 Unit dimana perunit diberikan juga bantuan benih ikan nila 20.000 ekor, pakan 3.000 Kg, bantuan benih dan pakan ikan, denfarm lele sistem bioflock, statistic budidaya dan forum budidaya/perbenihan.
- b. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, kegiatan ini didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan dan APBD II, dimana kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung produksi benih ikan. Kegiatan yang dilaksanakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan yaitu : rehab berat rumah karyawan BBI Danau Teluk, pengadaan perahu bermotor (fiberglass) 1 unit da perahu tanpa motor (fiberglass) 2 unit, pakan untuk calon induk dan happa sebanyak 8 buah.
- c. Kegiatan pengelolaan dan pemesanan produksi perikanan, kegiatan ini berupa bantuan paket sarana pengolahan sebanyak 11 paket, Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 2 kali untuk 300 orang, Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan untuk 50 Orang, lomba UMKM pengolahan hasil perikanan 1 kali dan pengujian sample produk hasil perikanan.
- d. Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, dimana kegiatan ini dalam rangka untuk mendukung kelestarian sumber daya perikanan terutama Perairan Umum Daratan (PUD),

bantuan benih dan pakan ikan lele untuk pemanfaatan lahan pekarangan, bantuan kolam terpal sebanyak 5 unit (terdiri dari kolam terpal, pakan per unit 90 kg dan benih ikan lele per unit 1.000 ekor).

Dari Alokasi Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 2.102.320.000,- secara umum kegiatan sudah terlaksana dengan baik, dimana pencapaian realisasi fisik pekerjaan sebesar 97,8 % sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.990.629.850,- atau sebesar (94,69 %).

Pencapaian yang telah dilakukan pada bidang perikanan tahun 2016 ini antara lain adalah produksi perikanan di Kota Jambi pada tahun 2016 mencapai 2.612,71 ton yang terdiri dari produksi perairan umum (penangkapan) sebesar 908,9 ton, budidaya kolam sebesar 984,23 ton dan keramba/jarring apung sebesar 719,58 ton. Bila dibandingkan produksi tahun 2015 sebesar 3.008 ton, maka pada tahun 2016 secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar 395,29 ton atau sebesar -13,14%.

Selama tahun 2016 produksi benih yang dihasilkan sebanyak 48.358.280 ekor, jika dibandingkan dengan produksi benih ikan pada tahun 2015 sebanyak 46.348.050, maka pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 2.010.230 ekor atau meningkat sebesar 4,4%. Konsumsi ikan masyarakat Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar 33,3 kg/kap/Tahun, jika dibandingkan konsumsi ikan Kota Jambi tahun 2015 sebesar 33,1 kg/kap/Tahun, maka pada tahun 2016 meningkat sebesar 0,2 kg/kap/Tahun atau meningkat sebesar 0.6%.

4.2.6. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pasar Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditujukan untuk peningkatan peredaran barang dan jasa yang sesuai standar, terwujudnya peningkatan jumlah usaha formal dan informal, tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan perpasaran sebagai salah satu penyumbang PAD Kota Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan sarana penunjang lainnya untuk mewujudkan pasar bersih, kondusif dan representatif, serta meningkatkan pelayanan, pembinaan, penataan dan penertiban pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan dan konsisten guna mewujudkan perilaku yang berakhlak dan berbudaya.

Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2016 sebesar Rp. 9.073.238.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.571.690.240,- atau 94,47%. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan urusan perdagangan diantaranya adalah:

1. Terlaksananya lanjutan pembangunan Pasar Olak Kemang di Kecamatan Danau Teluk.
2. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan, pameran-pameran, bazar, pasar murah dan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian di pasar rakyat.
4. Terlaksananya penertiban serta pengamanan pasar pada hari-hari besar dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima serta mewujudkan Pasar Kota Jambi yang bersih dan tertib sekaligus rasa aman di lingkungan pasar pada hari-hari besar.
5. Penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir atau pertokoan (sewa) pada tahun 2016 ditargetkan Rp. 4.000.000.000,- tercapai (realisasi) Rp. 3.709.525.403,- (92,74%).

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, pada tahun 2016 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perdagangan adalah peningkatan cakupan bina perdagangan/usaha informal sebesar 2,80% atau 126 unit usaha, terjadi peningkatan target sebesar 5,30% atau 238 unit usaha, rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional pemerintah sebesar 72,25% dan peningkatan rasio PKL yang tertata sebesar 55 %.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perdagangan adalah:

1. Kesiapan sumber daya manusia pada IKM, pola kemitraan yang belum berjalan secara optimal, juga pengaruh pasar bebas dan persaingan usaha yang semakin ketat.
2. Target Retribusi Daerah tahun 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.709.525.403,- atau 92,74%. Target yang tidak tercapai disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian pedagang kaki lima untuk membayar retribusi pasar tepat waktu dan penghitungan target sewa pasar dihitung berdasarkan jumlah semua Ruko, Toko, Kios dan Los/Petak yang ada termasuk yang kosong, sehingga Kios/Toko yang kosong menjadi tunggakan pada target pendapatan.

4.2.7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian ditujukan untuk peningkatan daya saing produk lokal, peningkatan sarana dan prasarana IKM, pembinaan dan peningkatan jumlah IKM serta peningkatan jangkauan wilayah pemasaran produk IKM.

Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perindustrian pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.800.493.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.569.072.384,- dan realisasi fisik sebesar 100 %, pencapaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 87,15 %.

Pada tahun 2016 kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian antara lain melaksanakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, pameran, lomba, pemberian bantuan hibah barang kepada masyarakat dan revitalisasi rumah batik sebanyak 3 unit di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk dan Kelurahan Jelmur Kecamatan Pelayangan. Revitalisasi ini diperuntukan kepada pengrajin yang telah menerima sertifikat OVOP (One Village One Produk) dari Kementerian Perindustrian RI pada tahun 2015.

Berdasarkan RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Urusan Perindustrian adalah peningkatan jumlah IKM mandiri, dan peningkatan pertumbuhan industri. Pencapaian jumlah IKM Mandiri pada tahun 2016 tercatat sebanyak 402 IKM melebihi target IKU RPJMD dan pertumbuhan industri pada tahun 2016 tercatat 2.884 industri atau meningkat dari tahun 2015 dengan jumlah 2.654 industri atau 7,98%, target ini melebihi pada RPJMD untuk tahun 2016 sebesar 3,10%.

BAB V

PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Secara umum dasar hukum dari tugas pembantuan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan alokasi pendanaan tugas pembantuan diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisikan mengenai penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan, serta pertanggung-jawaban dan pelaporan dana tugas pembantuan.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2007, menegaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari provinsi ke kabupaten/ kota serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, setiap daerah dan atau desa diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Urusan pemerintah yang dapat ditugasperbantukan adalah kewenangan dari institusi pemerintah pusat yang menugaskan.

Sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Tugas Pembantuan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, dimana dijelaskan bahwa Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan daerah atau desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Pemerintah Kota Jambi hanya menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan belum memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintahan yang lebih rendah.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Jambi menerima dana tugas pembantuan sebesar Rp 9.531.809.000,- dari 3 (empat) Kementerian / Lembaga pusat sebagai pemberi Tugas Pembantuan yaitu:

- A. **Kementerian Pertanian RI** yang diberikan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan, mendapat dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.594.005.000.

Adapun alokasi Tugas Pembantuan (TP) tersebut digunakan untuk Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan dan Program Peningkatan produksi dan produktivitas produk sayur dan tanaman obat ramah lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kota Jambi.

- B. **Kementerian Perdagangan Republik Indonesia** yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, mendapat dana Tugas Pembantuan Bantuan sebesar

Rp. 6.921.720.000,- Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016, nomor SP DIPA-090.02.401757/2016.

Tugas Pembantuan yang diterima dalam pelaksanaannya dipergunakan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Banjar.

Disamping melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi untuk tahun 2016 juga memperoleh tugas tambahan memberikan bantuan hibah barang dari Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian RI bagi masyarakat Kota Jambi berupa : Sepeda Jamu sebanyak 100 unit, Tenda untuk PKL sebanyak 100 unit, Gerobak dagang sebanyak 50 unit.

- C. **Kementerian Dalam Negeri RI** (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil) yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, mendapat dana sebesar Rp. 1.016.084.000,- Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016, DIPA nomor: SP DIPA-010.08.4.105162/2016 tanggal 21 September 2016 oleh Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI.

Alokasi dana tersebut untuk melaksanakan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) terpadu, dengan capaian kinerja tersedianya Data Base Kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan Dokumen Kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koreksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya reguler daerah tentang administrasi kependudukan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

6.1.1 Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan yang dilaksanakan pada kerjasama antar daerah adalah melalui program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dengan kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerja sama antara daerah dalam penyediaan pelayanan publik, Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), pertemuan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Keikutsertaan Pemerintah Kota Jambi dalam ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*), UCLG (*United Cities and Local Government*) dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik

Adapun kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Daerah pada tahun 2015 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 8.104.575.000,00 dimana realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 95.35% atau Rp.7.723.365.000,00 Yang didalamnya terdapat dua sub kegiatan yaitu, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kota Jambi, dan penyelenggaraan kegiatan APEKSI.

TKKSD yang merupakan tim koordinasi penyelenggaraan kerjasama daerah, dimana setiap kerjasama harus melalui kajian tim TKKSD untuk mendapatkan kerjasama yang saling menguntungkan, namun pada tahun 2016, Tim TKKSD belum berfungsi secara optimal.

6.1.2 Kegiatan Pertemuan APEKSI

SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan ini adalah Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi, pada kegiatan Fasilitasi dan peningkatan kerjasama antar daerah dengan Pagu Anggaran **Rp 8.104.575.000,-**. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan MUNAS V APEKSI di Kota Jambi sebesar Rp. 7.800.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 7.470.000.000.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Tahun 2016, kegiatan Komwill II Apeksi yang diikuti oleh Kota Jambi sebanyak satu kali, yaitu: Catur wulan II APEKSI Sumbagsel tahun 2016 di Kota Metro.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Regional se-Sumbagsel dan caturwulan II APEKSI Sumbagsel tahun 2016.

Program peningkatan kerjasama APEKSI ini masih terbatas pada pertemuan-pertemuan Rakernas Anggota APEKSI se-Indonesia dan pertemuan Caturwulan Anggota APEKSI Komwil II se-Sumbagsel, dimana pada pertemuan tersebut dibahas tentang Peraturan-peraturan Pemerintah yang dipandang masih kurang mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pada pertemuan MUNAS V APEKSI di Kota Jambi tanggal 26 s.d 29 Juli 2016, tema yang diangkat adalah STRATEGI PELAKSANAAN OTONOMI PASCA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Dari pertemuannya itu dibuatkan rekomendasi dan usulan yang konstruktif.

Selanjutnya pada tahun 2016, Kota Jambi mengikuti Pertemuan Rakor APEKSI Komwil II Sumbagsel Caturwulan II Tahun 2016 di Kota Metro tanggal 24 s.d 25 Mei 2016 dengan mengangkat tema *Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Vertikalisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Penyerahan Personil, Prasarana/Sarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

6.1.3. Kegiatan Pertemuan AKKOPSI

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Jambi juga masih menjadi anggota Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), yang merupakan aliansi kabupaten/kota untuk mendorong terwujudnya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia, dalam rangka memenuhi target universal access sanitasi pada akhir tahun 2019.

Kegiatan AKKOPSI yang diikuti oleh pemerintah Kota Jambi pada tahun 2016 diantaranya adalah CITY SANITATION SUMMIT (CSS) – XVI berlokasi di Banda Aceh, pada tanggal 24 November 2016. Adapun kesimpulan pada kegiatan ini adalah Untuk mewujudkan kondisi sanitasi yang ideal, sekaligus untuk memenuhi target *universal access* sanitasi pada akhir tahun 2019 di masing-masing kabupaten/kota, maka setiap Kepala Daerah anggota AKKOPSI berkomitmen untuk :

1. Melakukan secara langsung koordinasi dan monitoring rutin berkala terhadap progres pembangunan sanitasi di kabupaten/kota masing-masing secara terpadu, terukur dan sesuai Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
2. Membentuk dan menerapkan kebijakan daerah tentang GERAKAN SANITASI TERPADU untuk memastikan terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan sanitasi terutama dalam upaya mewujudkan sinergi lintas SKPD dan non-SKPD termasuk TNI, pihak swasta,

para tokoh dan organisasi keagamaan, serta pihak swasta untuk kesuksesan pembangunan sanitasi di daerah.

3. Setidak-tidaknya mewujudkan stop perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, sekaligus meningkatkan kualitas dan peran regulator serta operator layanan air limbah.
4. Meningkatkan kinerja dan sinergitas regulator dan operator dalam upaya keterpaduan program pengurangan sampah dari sumbernya, mendorong pembentukan dan menjaga keberlangsungan siklus bisnis persampahan di daerah.
5. Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan desa maupun dalam pengalokasian dana desa, dan memfasilitasi pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dalam pemanfaatan dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf produktif untuk penyediaan akses sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
6. Mendorong secara aktif pembentukan kebijakan nasional yang terkait dengan SOTK Daerah, yang dapat mendukung terjadinya percepatan penyediaan layanan sanitasi, maupun kebijakan nasional yang terkait dengan alokasi APBN serta hibah dari mitra pembangunan bagi percepatan penyediaan layanan sanitasi di daerah.

6.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerja sama Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan Pihak Ketiga dilaksanakan melalui Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi dalam bentuk penerbitan perizinan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014, Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada BPMPTT yang berwenang untuk mengeluarkan 41 jenis izin dan penambahan 1 izin lagi menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sehingga total jenis pelayanan perizinan yang ada di Kota Jambi berjumlah 42 buah. Pada tahun 2016, Izin prinsip yang dikeluarkan berjumlah 11 (sebelas) buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 320.035.500.000,- sebagaimana tergambar pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Daftar Izin Prinsip Yang Terbit Tahun 2016

No.	Nama Perusahaan	Nama Usaha	Tanggal izin	Rencana Investasi (Rp.)
1.	CV. Teksindo Lestari	Real Estate	15 Feb 2016	7.400.000.000
2.	PT. Raja Satria Mandiri	MM Raja	14 Maret 2016	4.500.000.000
3.	PT. Aroma Cempaka	Cempaka	17 Maret 2016	5.106.000.000
4.	PT. Inti Cakrawala Citra	Indogrosir	30 Maret 2016	225.000.000.000
5.	PT. Sinar Berlian Nusantara	Supermarket (Fress Moon)	25 April 2016	4.057.500.000
6.	PT. Halina Mutiara	Developer/Real Estate (Perumahan)	30 April 2016	8.472.000.000
7.	PT. Golden Harvest Hotel	V-Hotel	26 Juni 2016	12.000.000.000
8.	PT. Ratu Permata Hotelindo	Hotel ODUWA WESTON	26 Juni 2016	33.375.000.000
9.	PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK.	Minimarket (Alfamart)	30 Juni 2016	17.000.000.000
10.	CV. Tropi Mart	Supermarket (Sijenjang)	24 Oktober 2016	1.800.000.000
11.	CV. Tropi Mart	Supermarket (Tl. Bakung)	3 November 2016	1.325.000.000
Jumlah				320.035.500.000

Pada Tahun 2016, terdapat sebanyak 13 (tiga belas) buah *Memorandum Of Undersranding/Nota Kesepahaman* yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Jambi dengan pihak ketiga, sementara pada tahun 2015, terdapat 7 MoU yang ditandatangani. Table 6.2 dibawah menunjukkan kesepakatan yang dilakukan sepanjang tahun 2015 dengan pihak ketiga.

Tabel 6.2.
Memorandum of Understanding yang ditanda tangani oleh
Pemerintah Kota Jambi dengan pihak ketiga Tahun 2016

No.	TANGGAL NOMOR MoU	NAMA MoU	MASA MoU	NAMA PARA PIHAK
1.	27 Februari 2016	Nota kesepahaman Antara Pemerintah kota Jambi dengan PT. Telekomunikasi Indonesia TBK Divisi Regional I Sumatera tentang kerjasama Pembangunan Smart City Kota Jambi	1 (satu) Tahun	1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Epi Antonius General Manager PT. Telekomunikasi Indonesia TBK Wil. Telekomunikasi Jambi
2.	21 Maret 2016	Kesepakatan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5 (lima) Tahun	1. Mr. Karliansyah Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan 2. Zumi Zola Gubernur Jambi 3. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi
3.	04 April 2016	Kerjasama dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pegawai tidak tetap pusat		1. Untung Suseno Sekjen Kemenkes 2. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi
4.	15 April 2016			1. OMBUDSMAN 2. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi
5.	26 Agustus 2016	Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Kota Jambi dengan Komandan Kodim 0415 Batanghari tentang Kegiatan Karya Bhakti Pembangunan/ Pemeliharaan Jaringan Sungai, Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Pekerjaan Normalisasi Sungai Tahun 2016	5 (Lima) Bulan	1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Widodo Noercahyo Komandan Distrik Militer 0415 Batanghari
6.	29 Agustus 2016	Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk, Kantor Cabang Jambi tentang Pemanfaatan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2)	3 (tiga) Tahun	1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Roganda SM Siahaan Kepala Bank BTN Jambi
7.	29 Agustus 2016	Pemanfaatan jasa dan Layanan untuk menerima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2)		1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Andreas Kurniawan Marketing Strategy Division Head
8.	29 Agustus	Pemanfaatan layanan Bukopin untuk Penerima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2)		1. H. Syarif Fasha,ME Walikota Jambi 2. Akhmad Yoni Wirawan Pemimpin PT. Bank

				Bukopin Tbk, Cabang Jambi
9.	29 Agustus 2016	Pemanfaatan Layanan Pos untuk Penerimaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	2 (dua) Tahun	1. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi 2. Dimat Tjachrudi Kepala Regional III Sumbagselbabel
10.	3 September 2016	Pengadaan CPNS Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian		1. Hari Priyono Sekjen Kementerian Pertanian RI 2. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi
11.	4 Oktober 2016	Kerjasama dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik berupa Penyuluhan Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sederajat	1 (satu) Tahun	1. Dwi Prasetyo Santoso, SH, MH Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi 2. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi
12.	30 November 2016	Nota kesepahaman Antara Kepolisian Daerah Kota Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi tentang Assesment Seleksi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi		1. Brigjen Pol. Drs. Yazid Fanani, Msi Kapolda Jambi 2. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi
13.	15 Desember 2016	Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Jambi dengan PT. Daya Mitra Telekomunikasi tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Smart City Kota Jambi	1 (satu) Tahun	3. H. Syarif Fasha, ME Walikota Jambi 4. Rakhmad T. Afifudin Direktur Bisnis PT. Daya Mitra Telekomunikasi

Selain kerjasama dengan Asosiasi di Indonesia, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2016 seperti tahun 2015 tetap melakukan kerjasama dengan ICLEI dan UCLG.

ICLEI, atau *International Council for Local Environmental Initiatives* merupakan asosiasi pemerintah daerah, nasional dan regional yang memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Semenjak keanggotan Pemerintah Kota Jambi yang di mulai tahun 2015, Kota Jambi pada tahun 2016 menandatangani MOU program *Asian Cities Climate Change Resilience Network* (ACCCRN) dan Compact of Mayor pada Kongres Kota Berketahanan Iklim se-Asia Pasifik 2016 di Melaka yang diselenggarakan bersamaan dengan the 16th *International Convention on Melaka Twn Cities* pada tanggal 2 – 4 Maret 2016. Pemerintah Kota Jambi juga diundang sebagai narasumber pada konferensi *Municipal Finance, Sustainable Urban China dan Smart Cities* pada bulan Mei, 2016 di Berlin yang merupakan bagian dari Metropolitan Solution, namun tidak dapat dihadiri karena kegiatan di kota. Pada akhir tahun 2016, pemerintah Kota Jambi melalui Badan Lingkungan Hidup berkerja sama dengan Dinas Pertanian, Perikanan

dan Perternakan Kota Jambi mengirim proposal Pertanian Perkotaan Organik sebagai salah satu bentuk bantuan (*grant*) dari MOU ACCCRN.

Pada bulan Mei 2016, pemerintah kota Jambi diundang menjadi narasumber pada acara *Sub-National Leaders Meeting on Sustainable Development, From Cities to the World* di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, yang dilaksanakan dengan peluncuran forum *Compact of Mayors* yang ditanda tangani oleh kurang lebih 15 kota di Indonesia. Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menandatangani MOU *Compact of Mayors* pada bulan Februari 2016 di Melaka.

Selain itu ditahun 2016, Pemerintah Kota Jambi menjadi anggota aktif **UCLG** atau *United Cities dan Local Government* yang payung dari semua organisasi kota, pemerintah daerah, kabupaten di seluruh dunia, dengan tujuan untuk :

- 1) Mempromosikan demokrasi di pemerintahan daerah dengan mengutamakan persatuan dan kerjasama antara anggota,
- 2) Mempresentasikan pemerintah local di wahana internasional, PBB dan komunitas internasional lainnya,
- 3) Menjadi sumber dari semua informasi terkait dengan pembelajaran, pertukaran, peningkatan kapasitas daerah,
- 4) Mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan untuk meningkatkan layanan publik dengan prinsip *good governance*,
- 5) Mempromosikan kerjasama dalam hal desentralisasdi dan kerjasama internasional antara pemerintah daerah dan organisasi lainnya.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota telah difasilitasi mengikuti seminar dan training diantaranya:

1. Seminar *smart cities aspirations and challenges UCLG Aspac Executive Bereau Meeting* di New Delhi India pada tanggal 4 – 9 Mei 2016. Pemerintah Kota Jambi menjadi pembicara sesi *Innovative Urban Governance and Empowered City Leadership - A Requisite for Urban Transformation*. Pada saat bersamaan, pemerintah kota Jambi berkunjung ke Duta Besar RI untuk India, bapak Rizali Wilmar Indrakesuma yang didampingi oleh Sekretaris I Bidang Ekonomi KBRI a membicarakan rencana pertemuan produsen Indonesia dan buyer India di KBRI, yang kemudian *difollow up* dengan mengundang pemerintah Kota Jambi untuk menghadiri New Delhi expo pada bulan Agustus 2016.
2. Sebagai nara sumber pada Congress ULCG ASPAC yang ke-6 di Jeollabuk, Korea Selatan, "*Region, Life and Culture in the New Urban Agenda*". pada tanggal 5 – 9 September 2016. Pemerintah Kota Jambi memberikan paparan pada sesi *UN Habitat's Principles and Approaches for Sustainable Urban Development and Planning* yang di hosted oleh UN Habitat dan UCLG ASPAC.
3. Sebagai narasumber pada acara UCLG ASPAC *Coordination Meeting with Indonesian Cities and Local Governments* pada tanggal 27 Oktober 2016, di Solo, pada sesi "*Making*

Connectivity and Impact in the Ground: Pro-poor and Sustainable Solid Waste Management for Secondary City/Town, yang dipaparkan oleh Wakil Walikota Jambi, yang dihadiri oleh kepala daerah dari: Malang, Sragen, Tangerang Selatan, Bojonegoro, Solo, Salatiga, Jakarta dan beberapa perwakilan dari negara Asia Pacific seperti Makati, Phillipine, Korea Selatan, Korea Utara, India, Bangladesh, dan Maldives.

Kerjasama lain dengan pihak ketiga, juga dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan pemerintah kota Jambi dalam program dan kegiatan yang dibantu oleh pemerintah pusat KLHK dan bantuan luar negeri, diantaranya adalah *Pilot Project Waste To Energy (WTE)* yang merupakan grant dari UNESCAP dan difasilitasi oleh UCLG. Pada tahun 2016, lokasi WTE telah dipilih yaitu Pasar Talangbanjar. Dikarenakan MOU antara UNESCAP dengan KLHK berakhir pada akhir tahun 2016, sementara masih ada pekerjaan fisik yang selesai, maka MOU antara KLHK dan UNESCAP diperpanjang sampai akhir Desember 2017.

Keikutsertaan pemerintah kota Jambi dalam project WTE ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah kota Jambi untuk menghadiri training tentang *Solid Waste Management* di Thailand yang diikuti oleh ASN dari BLH dan pelatihan *IRRC (Integrated Resource Recovery Center)* di Bangladesh, yang diikuti oleh ASN dari BLH, DKPP dan Dinas Pasar.

Pemerintah Kota Jambi juga diundang menjadi pembicara pada *workshop on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asian and Pacific Cities*, di *United Nations Conference Centre*, Bangkok, Thailand, 28 November – 2 Desember 2016. Pemerintah Kota Jambi memberikan masukan tentang Urban SDGs Platforms yang telah disusun oleh ESCAP beserta team, yang juga dilakukan *soft launch Platform* tersebut. *Sustainable Development Goals (SDGs)*, merupakan agenda internasional yang didukung oleh negara – negara berkembang maupun maju. SDGs dimulai semenjak tahun 2015 yang merupakan follow up dari beberapa target dalam MDGs.

6.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan / atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan di implementasikan melalui kegiatan koordinasi pemerintahan daerah dengan instansi vertikal di daerah yang diarahkan untuk mensinergikan dan

mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan di daerah sebagai proses komunikasi dan interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah melalui rapat-rapat yang berbentuk forum, yaitu :

1. Forum Koordinasi Keamanan Ketentraman dan Ketertiban
2. Forum Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
4. Forum Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
5. Forum Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)
7. Forum Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitas bagi ORKEMAS dan PARPOL
8. Forum Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik.

6.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kota Jambi merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jambi, hal ini diresmikan dengan dikeluarkannya UU No. 61 tahun 1958 pada tanggal 6 Januari 1957. Dengan luas wilayah $\pm 205.38 \text{ km}^2$ (berdasarkan UU No. 6 tahun 1986), secara geografis terletak pada $01^\circ 30' 2.98'' - 01^\circ 7' 1.07''$ lintang selatan dan $103^\circ 40' 1.67'' - 103^\circ 40' 0.23''$ bujur timur. Dimana seluruh wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kabupaten Muaro Jambi dapat diartikan sebagai kawasan interland dimana Kota Jambi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Seiring perjalanan waktu, luas Kota Jambi mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 - 2033 kondisi *existing* luas Kota Jambi $\pm 17.553 \text{ ha}$. Akan tetapi saat ini masih terjadi perbedaan pandangan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi terkait batas-batas wilayah pada beberapa titik koordinat. Hal ini masih terus dalam upaya mencari kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dimediasi oleh Pemerintah Pusat.

Disamping itu, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Pall Merah jumlah Kecamatan di Kota Jambi saat ini terbagi menjadi 11 Kecamatan. Dimana sebelumnya berjumlah 8 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Pasar, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.

6.5. PENANGANAN BENCANA

Kota Jambi adalah merupakan bagian dari Pulau Sumatera dan termasuk dalam lingkup Propinsi Jambi, dibagian barat Propinsi Jambi terdapat pegunungan Bukit Barisan yang dibatasi oleh Gunung Kerinci dan bagian timurnya langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan hilir dan selalu menerima kiriman air dari beberapa anak sungai di bagian hulunya sehingga rawan akan banjir, perubahan iklim juga sering berpengaruh langsung sebagai penyebab timbulnya bencana, oleh karena itu Kota Jambi dikategorikan masih termasuk dalam lingkaran ancaman bencana terutama yang disebabkan oleh alam, kerawanan Kota Jambi terhadap bencana dapat dilihat juga dari sering terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, bencana angin puting beliung dan bencana kabut asap.

Pada tahun 2016 tingkat kejadian kebakaran menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 181 kejadian menjadi 69 kejadian atau sekitar 61%. Selain tindakan penyelamatan, BPBD Damkar pada tahun 2016 juga memberikan bantuan korban bencana alam sebesar Rp. 576.000.000,- kepada 91 orang penerima bantuan sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 tahun 2015. Penurunan tingkat kejadian kebakaran disebabkan telah meningkatnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan bencana kebakaran serta hal-hal yang dapat dipengaruhi oleh musim kemarau.

Dari 69 kejadian, penyebab kebakaran yang paling tinggi masih dipengaruhi oleh Korsleting Listrik sebanyak 41 kejadian, dengan jumlah kejadian terbesar berada di Kecamatan Jelutung, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.3.
Kejadian Kebakaran Tahun 2016 Berdasarkan Kecamatan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian	Keterangan
1	Pasar	6 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
2	Jambi Timur	8 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
3	Telanaipura	10 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
4	Jambi Selatan	6 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
5	Kotabaru	6 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
6	Pelayangan	2 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
7	Danau Teluk	3 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
8	Jelutung	11 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
9	Alam Barajo	3 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
10	Danau Sipin	6 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
11	Paal Merah	9 Kejadian	Tidak ada korban jiwa
12	Muaro Jambi	0 Kejadian	-
	Jumlah	69 Kejadian	

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi

Dalam kejadian kebakaran selama tahun 2016 menimbulkan korban jiwa sebanyak 1 (satu) orang, dan kerugian materi diperkirakan sebesar Rp. 9.211.400.000,- (Sembilan milyar dua ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Jambi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dan masyarakat secara umum, di Kota Jambi telah dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang anggotanya terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas PU, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan Kota Jambi serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang terkait dan berbagai unsur masyarakat

Dalam menghadapi bencana, Tim Penanggulangan Bencana Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana Propinsi, hal ini bermanfaat karena jika pada saat terjadi bencana Tim Penanggulangan Bencana Kota Jambi bisa mendapatkan bantuan dengan cepat utamanya untuk penanggulangan tanggap darurat

Adapun kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka persiapan penanggulangan bencana di Kota Jambi adalah :

1. Telah disiapkan satu regu Tim SAR dari Personil Kodim 0415 Batanghari Khusus untuk penanganan banjir Aliran Sungai Batanghari ini dan bila terjadi keadaan memaksa maka dapat diturunkan Tim dari Pol Airut.
2. Telah disiapkan Tim Siaga Satuan Penanggulangan Bencana yang posko utamanya berada di Dinas Kesbang & Polinmas Kota Jambi, anggotanya terdiri dari lintas sektoral Instansi dalam Kota Jambi termasuk dari TNI dan Polri.
3. Telah disiapkan Tim Pemantau Daerah Rawan Bencana khususnya Banjir untuk melihat situasi dan Kondisi dinamika ketinggian air terutama pada saat musim hujan.
4. Melaksanakan Tindakan Pemadaman kebakaran sesuai dengan data bencana kebakaran dengan menggunakan peralatan yang tersedia, dan juga memberikan bantuan peduli bencana bagi masyarakat yang terkena bencana khususnya kebakaran.

6.6. PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.6.1 Gangguan Yang Terjadi

Selama tahun 2016, secara umum kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kota Jambi cukup baik. Adapun masalah yang terjadi yaitu konflik rumah ibadat di 5 (lima) tempat. Setelah dilaksanakan musyawarah dan disepakati bersama, maka diputuskan untuk membuat Peraturan Walikota Jambi tentang masalah pendirian rumah ibadat. Pemerintah Daerah dan FKUB Kota Jambi akan memfasilitasi pengurusan izin rekomendasi pendirian rumah ibadat.

Selanjutnya mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih dalam skala kecil dan relatif terkendali seperti berupa pelaksanaan aksi-aksi demonstrasi/unjuk rasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib, masih banyaknya pengemis dan pengamen jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat umum, Pelanggaran Perda dan Keputusan Walikota, kenakalan remaja dan anak sekolah, penggunaan lahan parkir yang tidak tertib.

6.6.2 SKPD Yang Terlibat Dalam Penanganan Ketertiban dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk membantu Kepala daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Sedangkan Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Kota Jambi dilaksanakan secara lintas sektoral artinya ditangani oleh beberapa SKPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Sosnaker) dan Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Dalam pelaksanaan pengamanan keamanan dan ketertiban secara langsung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosnaker, sedangkan untuk kegiatan yang berbentuk pemantauan dan koordinasi seperti pembentukan komisi intelejen daerah, forum komunikasi antar umat beragama, badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesbangpollinmas.

6.6.3 Penanggulangan dan Kendala

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Perda PKL No.5 Tahun 2006 dan PW No.6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan,

untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi. Adapun area yang telah dilakukan penataan PKL selama tahun 2016 antara lain:

- a. Pasar Angso Duo dan sekitarnya,
- b. Pasar Talang Banjar dan sekitarnya,
- c. Pasar Keluarga, Tugu Juang dan sekitarnya
- d. Pasar Simpang Pulai dan sekitarnya
- e. Pasar Kebon Andil dan sekitarnya
- f. Pasar Simpang Bata dan sekitarnya
- g. Pasar Mayang sari dan sekitarnya
- h. Daerah-daerah sepanjang Jalan Protokol seperti: UNJA dan sekitarnya; IAIN dan sekitarnya; Sukorejo dan sekitarnya; Bandara dan sekitarnya;
- i. Daerah sepanjang Jalan Pattimura (STM, Mayang dan Nusa Indah)
- j. Daerah sepanjang jalan Kuburan Cina dan sekitarnya
- k. Daerah Perbatasan dengan Muara Jambi dan Terminal Alam Bara
- l. Daerah Paal V dan Jenderal Basuki Rahmat
- m. Pasar Jelutung dan sekitarnya

Satuan polisi pamong praja juga mengadakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang sudah diberlakukan di Kota Jambi, seperti izin mendirikan bangunan, izin undang-undang gangguan dan lain sebagainya.

Perkembangan pembangunan di Kota Jambi juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu perkembangan anak jalanan, pengemis dan pekerja seks komersial yang pertumbuhannya cukup tinggi. Berkaitan dengan pekerja seks komersial Pemerintah Kota Jambi telah melakukan penutupan lokalisasi Payo Sigadung dan Langit Biru serta penghapusan praktek prostitusi sesuai dengan PERDA Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dan terus melakukan razia, pengawasan, penyuluhan dan pembinaan dengan bekerja sama antar aparat keamanan (Poltabes), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) dan Unsur pemerintah lainnya.

6.6.4 Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Penanggulangan

Selama tahun 2016 pelaksanaan razia dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pramong Praja di berbagai wilayah dalam Kota Jambi dilaksanakan dengan berkoordinasi dan melibatkan unsur-unsur lain dalam pemerintahan termasuk aparat keamanan (POLRI dan TNI-AD). Tim Penertiban Pelanggaran Perda terdiri dari berbagai unsur Pemerintah termasuk aparat keamanan.

BAB VII PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil koordinasi, kerjasama dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2016 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kota Jambi bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor ekonomi dalam rangka Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing Daerah dengan mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sebagai lokomotif pertumbuhan. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik yang dipublikasi akhir Pebruari 2015 Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 % merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi maupun Nasional. Sebagai kawasan perkotaan yang berkembang perekonomian Kota Jambi bertumpu pada komoditas sekunder, yang secara gradual juga bergeser kepada komoditas tersier. Kondisi capaian ini dapat dijadikan landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Pilih Pusako Batuah.

Pada tahun 2016 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kota Jambi. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kota Jambi secara keseluruhan, serta

pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2016.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. *Amin ya robbal alamin.*

Terima kasih.

WALIKOTA JAMBI

H. SYARIF FASHA, ME

LAMPIRAN III : REALISASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	
1	2	3	
	3.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI		
1.1	Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana	Tersedianya sarana dan prasarana pasar	1 unit
	Pembangunan Pasar Rakyat Talang Banjar		
	Perencanaan		
	Konstruksi		
	Pengawasan		

3.2. DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SAPRAS PERTANIAN		
a	Pengem	Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan petani	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	

3.3. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	PROGRAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU		
a	Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Tersedianya Data Base Kependudukan berbasis NIK Nasional dan Pelayanan Dokumen Kependudukan	100%

ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	Persen %	FISIK %	PERMASALAHAN / SOLUSI
4	5	6	7	8
6,821,720,000	6,821,720,000	100.00		
6,821,720,000	6,821,720,000	100.00		
49,970,000	49,970,000	100.00	100.00	
6,625,000,000	6,625,000,000	100.00	100.00	
146,750,000	146,750,000	100.00	100.00	

471,390,000	459,133,860	97.4	100.00	
471,390,000	459,133,860	97.4	100.00	

1,001,734,000	1,001,734,000			
1,001,734,000	1,001,734,000			
1,001,734,000	1,001,734,000	100.00%	100.00	